



PEMERINTAH KOTA SERANG



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN 2019**



**BAGIAN ORGANISASI
DAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2020**



KATA PENGANTAR



Segala Puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Rosulullah SAW karena berkat limpahan dan rahmatnya, Pemerintah Kota Serang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang Tahun 2019.

Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan secara rinci upaya yang telah dilakukan dan capaian yang telah diraih yaitu dengan mengukur hasil pencapaian indikator-indikator sasaran misi pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Serang yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Pemerintah Daerah selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Serang yaitu:





“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”

sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Serang dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Serang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat menjadi cermin dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota selama Tahun 2019, namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu Pemerintah Kota Serang mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kota Serang Tahun 2019. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Serang.

Serang, 30 Maret 2020

WALIKOTA SERANG

H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si





PEMERINTAH KOTA SERANG INSPEKTORAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Serang - Banten Telp. (0254) 207538 Fax. (0254) 207538

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi Pemerintah Kota Serang untuk tahun anggaran 2019, sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Serang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 30 Maret 2020

INSPEKTOR KOTA SERANG



H. Yudi Sunyadi, S.Sos, M.Si

Perbina Utama Muda

NIP. 19671010 198801 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Serang telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

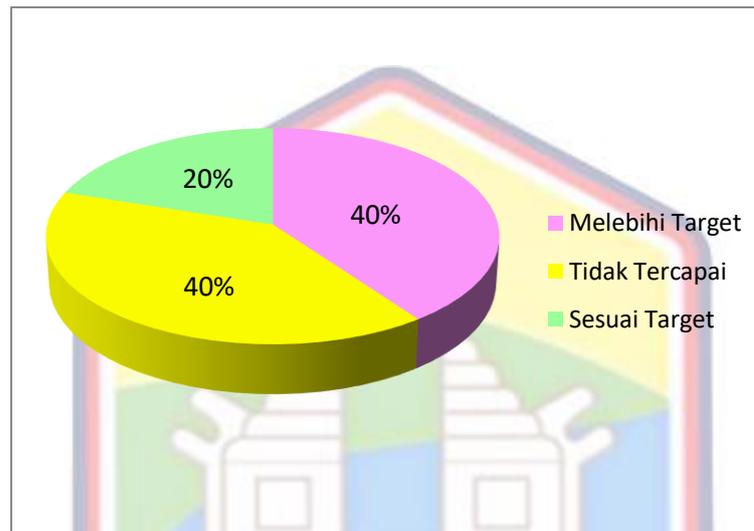
Tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023, dan Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.273-Huk/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019.





Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama pada 5 Tujuan Daerah dan 21 Sasaran Strategis Kota Serang yang telah ditetapkan pada tahun 2019, sebagai berikut:

- ✓ 2 indikator atau 40% melebihi target dengan kategori sangat baik
- ✓ 1 indikator atau 20% sesuai target dengan kategori sangat baik
- ✓ 1 indikator atau 40% tidak mencapai target kategori baik



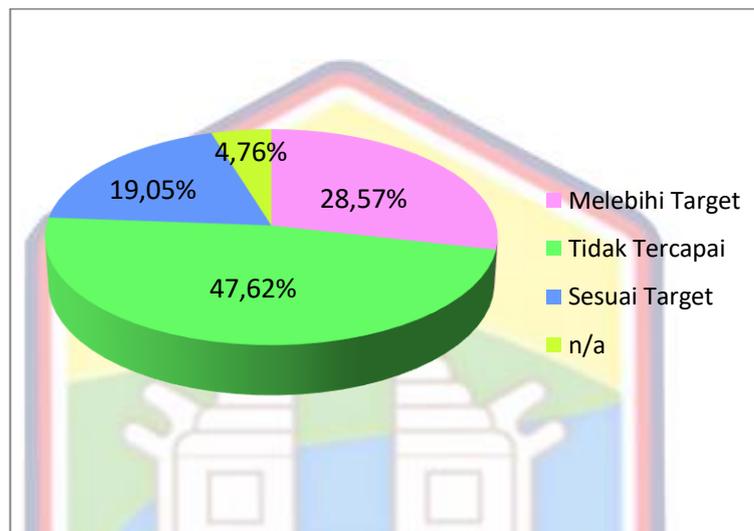
Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 100,63%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 100,04%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik
- c. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 67,92%, tidak mencapai target dengan interpretasi Cukup
- d. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 99,92%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik
- e. Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 139,58%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik
- f. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 90,91%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik
- g. Sasaran 7 terdiri dari 3 indikator dengan nilai capaian 79,23%, tidak mencapai target dengan interpretasi Baik





- h. Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 100%, mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik
- i. Sasaran 9 terdiri dari 6 indikator dengan nilai capaian 102,34%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik
- j. Sasaran 10 terdiri dari 4 indikator dengan nilai capaian 99,39%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik



Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Serang melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2019, telah menetapkan Program dan Kegiatan serta anggaran yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja sasaran yang telah dilakukan pengukuran telah berhasil dicapai dengan maksimal.

Anggaran yang digunakan dalam mencapai keberhasilan tersebut sebesar **Rp.752.676.622.154** dari pagu anggaran **Rp.802.924.438.674** sehingga terdapat efisiensi anggaran **Rp.50,247,816,520** atau 6,26%

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Serang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Serang, yang akan terus dipelihara dan akan lebih ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik.





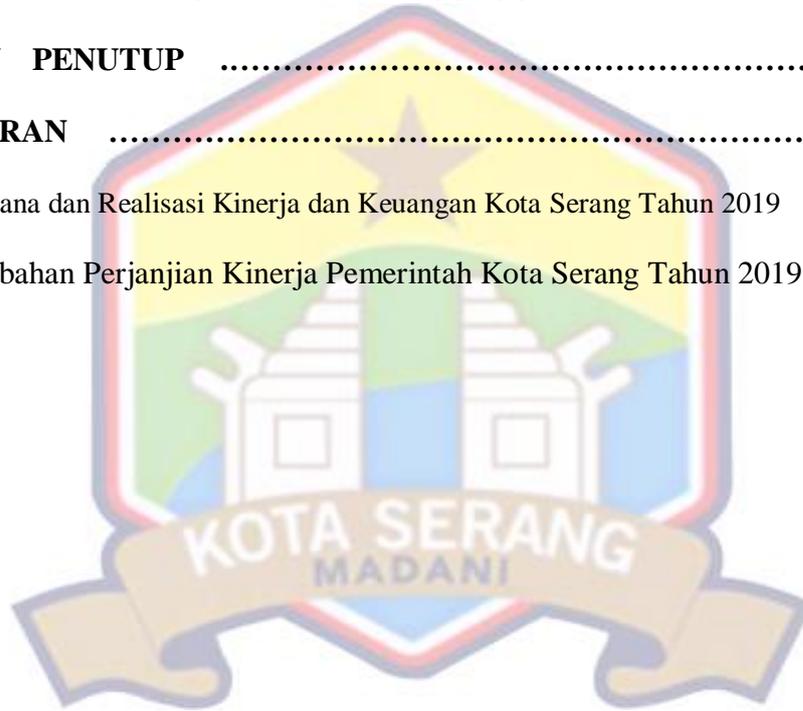
DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIEW	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. GAMBARAN UMUM KOTA SERANG	4
E. PERTUMBUHAN EKONOMI	13
F. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	18
G. SUMBER DAYA APARATUR	20
H. ISU STRATEGIS KOTA SERANG	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023	24
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	44
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	46
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019	49





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	52
B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS	53
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	99
D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI	106
BAB IV PENUTUP	110
LAMPIRAN	114
A. Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Serang Tahun 2019	114
B. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 ..	126





DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan	10
Tabel 1.2 Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2015-2019..	10
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015-2019	11
Tabel 1.4 Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2019	11
Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kota Serang yang Memiliki KTP sampai Tahun 2019	12
Tabel 1.6 Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang Tahun 2015-2019	13
Tabel 1.7 Nilai & Kontribusi PDRB Kota Serang Tahun 2018-2019	14
Tabel 1.8 Luas Panen (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Padi Tahun 2019	16
Tabel 1.9 Perkembangan Investasi/Penanaman Modal Kota Serang 2015-2019	17
Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	20
Tabel 1.11 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019.....	21
Tabel 2.1 Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Serang	33
Tabel 2.2 Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Serang	38





Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2019-2023	44
Tabel 2.4	Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2019	49
Tabel 2.5	Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2019	50
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2019	52
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2019	55
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Serang Tahun 2019	57
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2019	59
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	59
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2019	61
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	62
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019	63
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD	64
Tabel 3.10	Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2019	66
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2019	67
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD	67
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2019	68



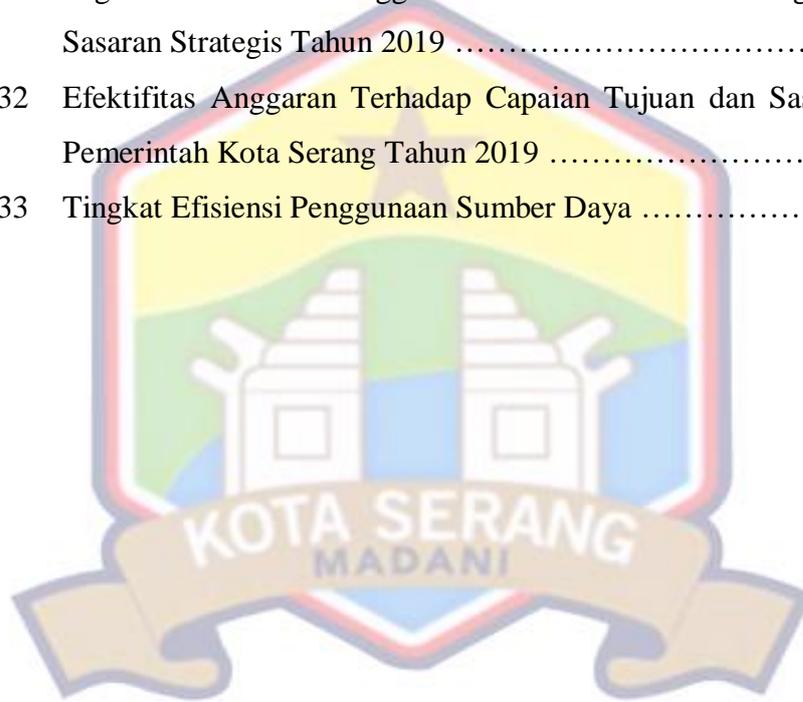


Tabel 3.14	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	68
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2019	69
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	70
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019	73
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	73
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019	79
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	79
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2019	81
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	85
Tabel 3.23	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2019	86
Tabel 3.24	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019	90
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD.....	90
Tabel 3.26	Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	91





Tabel 3.27	IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit Tahun 2019 ..	93
Tabel 3.28	Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2015-2019	94
Tabel 3.29	Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 – 2019	96
Tabel 3.30	Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2019	100
Tabel 3.31	Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang Per Sasaran Strategis Tahun 2019	101
Tabel 3.32	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Serang Tahun 2019	102
Tabel 3.33	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	104





DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1	Capaian IKU Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 53
Grafik 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 57
Grafik 3.3	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015 – 2019..... 58
Grafik 3.4	Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2015–2019 60
Grafik 3.5	Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2015–2019 60
Grafik 3.6	Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2015–2019 62
Grafik 3.7	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Serang Tahun 2015–2019 . 64
Grafik 3.8	Luasan Kawasan Kumuh Kota Serang Tahun 2017–2019 69
Grafik 3.9	Persentase Potensi Titik Kemacetan Tahun 2015–2019 70
Grafik 3.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016–2019..... 72
Grafik 3.11	Indeks Kualitas Udara Kota Serang Tahun 2016–2019 74
Grafik 3.12	Indeks Kualitas Air Kota Serang Tahun 2016–2019 74
Grafik 3.13	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang Tahun 2016–2019..... 75
Grafik 3.14	Cakupan Penanggulangan Bencana Tahun 2015–2019 79
Grafik 3.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2015–2019 .. 80
Grafik 3.16	Laju Inflasi Kota Serang Tahun 2015–2019 82
Grafik 3.17	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015–2019 84
Grafik 3.18	Tingkat Pengangguran Terbuka 2015–2019 85
Grafik 3.19	IKM Kota Serang berdasar Unsur Tahun 2017 – 2019 92
Grafik 3.20	Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017 – 2019 96





BAB 01 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bertitik tolak dari RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2019, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi





mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Serang Tahun 2019 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2019 yaitu tahun pertama RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 memiliki maksud sebagai upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 memiliki tujuan:

1. Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah Kota Serang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Serang kepada Pemerintah Propinsi Banten dan Pemerintah Pusat.
2. Memberikan informasi umum terkait dengan capaian kinerja keseluruhan Pemerintah Kota Serang sepanjang pelaksanaan RKPD Kota Serang pada tahun anggaran 2019.
3. Memberikan informasi capaian kinerja berupa angka capaian indikator-indikator misi yang terukur serta dapat memrepresentasikan kinerja Pemerintah Kota Serang yang sesungguhnya.
4. Memberikan berbagai informasi dan rekomendasi terkait capaian indikator kinerja sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap





peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan misi RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023;

5. Sebagai salah satu proses perbaikan dalam sistem perencanaan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

C. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;





7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Serang Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Walikota Serang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2019
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2019
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Serang.

D. GAMBARAN UMUM KOTA SERANG

1. Kondisi Geografis

Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang sebagai kabupaten induk sebelumnya, sebagaimana dijelaskan oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 bahwa





Kota Serang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Serang yang cakupan wilayahnya terdiri dari :

- a. Kecamatan Serang,
- b. Kecamatan Kasemen,
- c. Kecamatan Walantaka,
- d. Kecamatan Curug,
- e. Kecamatan Cipocok Jaya, dan
- f. Kecamatan Taktakan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, Kota Serang mempunyai batas-batas wilayah :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Banten;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikuesal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang; dan
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang.

Pada awal terbentuknya pada tahun 2007, Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan, 46 desa dan 20 kelurahan. Perkembangan kota yang cukup pesat serta tuntutan pelayanan publik yang lebih baik mendorong perubahan status 16 (enam belas) desa menjadi kelurahan pada Tahun 2011 melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2011, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 36 (tiga puluh enam) kelurahan dan 30 (tiga puluh) desa. Pada tahun 2012 dilakukan kembali perubahan status 15 (lima belas) desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, sehingga jumlah kelurahan bertambah menjadi 51 (lima puluh satu) kelurahan dan 15 (lima belas) desa. Selanjutnya setahun kemudian, kelima belas desa yang tersisa juga mengalami perubahan status menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah





Nomor 5 Tahun 2013 jumlah kelurahan di Kota Serang adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) kelurahan dan pada tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan, berupa pemekaran Kelurahan Cilowong menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu menjadi Kelurahan Cilowong dan Kelurahan Cibendung.

Wilayah Kota Serang secara astronomis terbentang di antara $5^{\circ} 99' - 6^{\circ} 22'$ Lintang Selatan serta di sepanjang $106^{\circ} 07' - 106^{\circ} 25'$ Bujur Timur. Berdasarkan sistem koordinat UTM (*Universal Transfer Mercator*) Zona 48E wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.600 m dari Barat ke Timur, serta pada 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan. Jika ditarik garis lurus dari utara ke selatan, maka jarak terpanjang yang didapat adalah sekitar 21,7 Km. Sementara itu jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 km. Letak wilayah Kota Serang secara geografis berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, sementara di bagian yang lain berbatasan dengan Kabupaten Serang.

Relief topografi Kota Serang didominasi dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Pengaruh iklim tropis menghasilkan variasi temperatur dengan amplitudo yang tidak terlalu ekstrem. Suhu minimum sepanjang 2018 adalah $31,40^{\circ}\text{C}$ terjadi di bulan Januari, sedangkan suhu maksimum tercatat pada bulan Oktober, sebesar $33,40^{\circ}\text{C}$ harian tertinggi tercatat pada bulan Oktober yaitu 34°C dan Suhu rata-rata harian terendah pada bulan Juli sebesar $22,20^{\circ}\text{C}$.

Kelembaban relatif terendah di Kota Serang pada tahun 2018 sebesar 94% terjadi pada bulan Agustus dan Oktober. Kelembaban relatif tertinggi tercatat pada bulan September, yaitu 76%. Kelembaban relatif rata-rata terendah tercatat pada bulan September, yaitu 42%. Sedangkan kelembaban relatif rata-rata tertinggi tercatat pada bulan Februari, yaitu 60%. Tekanan udara terendah di Kota Serang pada tahun 2018 tercatat pada bulan Januari, yaitu 1.007,70 mb. Sedangkan tekanan udara tertinggi,





tercatat di bulan Oktober, yaitu 1.010,70 mm. Pada tahun 2018 di Kota Serang, curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu 20 mm³. Sementara curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Maret yaitu 222,2 mm³.

Kota Serang memiliki peranan yang fundamental, selain merupakan pusat pemerintahan Provinsi Banten, jarak dari Kota Jakarta yang hanya sekitar 70 km, menjadikan Kota Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara dan memiliki posisi strategis untuk menunjang pertumbuhan perekonomian yang didukung oleh infrastruktur perhubungan darat yaitu terbentangnya Jalan Tol Jakarta-Merak dengan dua pintu keluar di bagian Timur dan Barat Kota Serang, serta berbatasan langsung dengan padatannya lalu lintas Laut Jawa dapat dimanfaatkan bagi kepentingan daerah. Posisi strategis Wilayah Serang yang masuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menurut RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Banten pada saat sekarang ini sudah dijadikan tujuan oleh pengguna dalam pengembangan dan pemanfaatan ruangnya.

Pengembangan potensi wilayah Kota Serang tak dapat dipisahkan sebagai bagian integral Provinsi Banten, sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah serta sosial ekonomi masyarakat yang menekankan pada pengembangan pembangunan pada bidang pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa. Kota Serang mempunyai kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal dasar untuk membangun wilayah secara optimal guna mencapai kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Peluang dan potensi wilayah di Kota Serang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Wilayah Wisata Ziarah

Pengembangan wilayah wisata ziarah berada di wilayah Kecamatan Kasemen dengan luas wilayah 63,36 Ha berjarak 4 Km dari pusat Kota Serang, Jenis industri yang potensial untuk di





kembangkan antara lain : Industri makanan, industri jasa angkutan, wisata religi, industri pertanian, industri kerajinan gerabah. Untuk memacu perkembangan kawasan Wisata Ziarah ini Pemerintah Kota Serang sudah melakukan pembangunan fisik yaitu meliputi pembangunan infrastruktur dalam kawasan dan pemugaran kawasan ziarah, penerangan jalan, jalur hijau dan penataan parkir.

2. Pengembangan Pelabuhan Karangantu

Pertumbuhan ekonomi Kota sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan hasil perikanan laut dan budidaya perikanan tambak. Pengembangan pelabuhan yang layak merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Serang, khususnya di wilayah pesisir pantai utara Kota Serang. Jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan antara lain adalah wisata kuliner, industri pengolahan hasil laut.

3. Pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Peremajaan Pasar

Beberapa pusat perbelanjaan milik pemerintah Kota sudah perlu di remajakan antara lain Pasar Rau, Pasar Royal, Pasar Lama, Pasar Taman Sari, Pasar Kalodran dan Pasar Karangantu. Saat ini peran swasta untuk ikut serta dalam kegiatan membangun pusat perbelanjaan sangat diperlukan dan menjadi salah satu sektor usaha pada bidang perdagangan yang sangat potensial.

4. Pengembangan Industri Perumahan

Peluang pengembangan kawasan dibidang perumahan, rumah susun, rumah sederhana serta RSS, masih sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah Kota Serang

5. Pengembangan Investasi Kota Serang terpusat pada kawasan-kawasan yang mempunyai nilai strategis, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yaitu:

- a. Pengembangan potensi pariwisata di kawasan cagar budaya Banten Lama





- b. Pengembangan potensi cagar alam di kawasan margasatwa Pulau Dua
- c. Pengembangan potensi perumahan, perkantoran, wisata belanja, dan kawasan sport center atau pusat perkotaan olahraga di kota satelit Curug dan Kemanisan Curug
- d. Pengembangan potensi perdagangan dan jasa serta pendidikan di koridor kawasan cepat tumbuh Cipocok Jaya dan Curug
- e. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Taktakan
- f. Pengembangan potensi kawasan Agrowisata buatan di Kecamatan Curug dan Cipocok Jaya.

Dalam rangka memberikan arah pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011, ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis yaitu :

- a. Kawasan Strategis Ekonomi :
 - Kawasan Pelabuhan Karangantu
 - Kawasan Pusat Perdagangan Kota
 - Kawasan Cepat Tumbuh Kota Serang
- b. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya :
 - Kawasan Banten Lama
- c. Kawasan Strategis Fungsi Daya Dukung Lingkungan :
 - Kawasan Cagar Alam Pulau Dua

Dengan luas wilayah mencapai 266,74 km², Kota Serang dibagi atas 6 Kecamatan dan 67 Kelurahan sebagaimana tabel 1.1 berikut:





Tabel 1.1
Luas Wilayah Kota Serang Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	% tase terhadap Luas Kota
1.	Serang	12	25,88	9,7
2.	Cipocok Jaya	8	31,54	11,82
3.	Kasemen	10	63,36	23,75
4.	Taktakan	13	47,88	17,95
5.	Walantaka	14	48,48	18,18
6.	Curug	10	49,60	18,59
Jumlah		67	266,74	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Serang Tahun 2019 berjumlah 652.192 jiwa. Dari jumlah tersebut 332.912 jiwa (51,05%) adalah penduduk laki-laki dan 319.280 jiwa (48,95%) adalah penduduk perempuan, dengan kepadatan penduduk sebesar 2.433 jiwa/km² terlihat pada Tabel 1.2 dan tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Serang Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Tingkat Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cipocok Jaya	31,54	2.659	2.725	2.797	2.860	2.898
2.	Curug	49,60	1.017	1.073	1.078	1.077	1.078
3.	Kasemen	63,36	1.449	1.489	1.509	1.494	1.534
4.	Serang	25,88	8.999	8.517	8.524	8.618	8.667
5.	Taktakan	47,88	1.746	1.846	1.875	1.890	1.912
6.	Walantaka	48,48	1.665	1.774	1.811	1.870	1.879
Rata-rata & Jumlah		266,74	2.301	2.337	2.355	2.382	2.433

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2019





Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2015-2019

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
2015	320.161	303.268	623.429	1,06
2016	323.286	305.148	628.434	1,06
2017	325.997	309.635	635.632	1,05
2018	328.797	313.789	642.586	1,05
2019	332.912	319.280	652.192	1,04

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2019

Dilihat dari komposisinya, pada tahun 2019 proporsi penduduk Kota Serang lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan, terlihat pada Tabel 1.3.

Komposisi penduduk Kota Serang menurut kelompok umur pada tahun 2019 terlihat pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Kota Serang Menurut Kelompok Umur
Tahun 2015-2019

Kelompok Umur	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
0 – 4	42,601	49,863	44,793	53.622	54.994
5 – 9	60,342	59,090	59,738	55.796	63.247
10 – 14	64,204	60,713	60,417	53.549	56.459
15 – 19	59,518	60,925	62,072	59.733	41.716
20 – 24	58,853	62,416	62,943	63.091	62.151
25 – 29	58,596	59,518	60,944	60.168	62.172
30 – 34	56,913	57,840	57,920	57.481	59.870
35 – 39	53,376	50,990	53,903	54.199	55.534
40 – 44	46,646	47,507	48,115	49.228	50.984
45 – 49	39,291	39,068	41,386	42.869	74.023
50 – 54	28,737	29,434	30,537	33.175	35.814





Kelompok Umur	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
55 – 59	22,089	21,226	22,292	24.186	25.846
60 – 64	13,508	13,820	14,196	16.097	17.191
65 – 69	8,202	7,723	8,185	9.564	11.118
70 -74	5,292	4,640	4,296	4.927	5.514
75+	5,261	3,661	3,895	4.901	5.559
Jumlah	623,429	628,434	635,632	642.586	652.192

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2019

Jumlah penduduk Kota Serang yang wajib KTP sebanyak 461.916 jiwa, sebanyak 456.158 jiwa atau 98,75% sudah memiliki KTP. Sisanya sebanyak 5.758 jiwa belum memiliki KTP, jumlah tersebut tersebar pada setiap kecamatan, terlihat pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kota Serang yang Memiliki KTP
sampai Tahun 2019

No.	Kecamatan	Wajib KTP	Memiliki KTP	%
1.	Cipocok Jaya	63,920	63,048	98.64
2.	Curug	38,831	38,315	98.67
3.	Kasemen	68,252	67,333	98.65
4.	Serang	160,974	159,136	98.86
5.	Taktakan	64,681	63,916	98.82
6.	Walantaka	65,258	64,410	98.70
	Kota Serang	461.916	456.158	98,75

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, 2019

Perkembangan Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten berdampak pada heterogenitas jenis penduduknya, walaupun Kota Serang memiliki landasan paradigma dan perspektif agamis dalam menjalankan visi dan misinya, namun tetap menghargai agama dan keyakinan lain yang





diakui oleh negara. Toleransi dari keberagaman kehidupan beragama telah tumbuh di Kota Serang, hal ini ditandai dengan berdampingannya mayoritas pemeluk Islam di Kota Serang dengan pemeluk-pemeluk agama lain, komposisi penduduk pemeluk agama di Kota Serang padatahun 2018 terlihat pada Tabel 1.6

Tabel 1.6
Komposisi Penduduk Pemeluk Agama di Kota Serang
Tahun 2015-2019

No	Agama	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Islam	610.346	615.956	622.666	629.291	638.474
2.	Kristen Protestan	6.768	6.781	7.203	7.651	8.003
3.	Kristen Katolik	3.223	2.939	2.999	2.930	2.934
4.	Hindu	280	256	257	261	246
5.	Budha	2.806	2.498	2.504	2.449	2.532
6.	Konghucu	-	-	-	-	2
7.	Kepercayaan	6	4	3	4	1
JUMLAH		613.774	628.434	635.632	642.586	652.192

Sumber: Disdukcapil Kota Serang, Tahun 2019

E. PERTUMBUHAN EKONOMI

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori sektor lapangan usaha.

Pengklasifikasian PDRB terbagi menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut kategori atau sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi



yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar juga menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.

Pembangunan perekonomian Kota Serang telah dilakukan secara optimal yang ditunjukkan antara lain oleh indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian PDRB atas harga konstan Kota Serang pada Tahun 2019 sebesar Rp.22,85 trilyun (ADHK), sedangkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) pada Tahun 2019 sebesar Rp.31,99 Trilyun. Perkembangan nilai PDRB ADHB dan ADHK menurut kategori atau sektor lapangan usaha Kota Serang Tahun 2018-2019 terlihat pada (Tabel 1.7)

Tabel 1.7
Nilai & Kontribusi PDRB Kota Serang Tahun 2018-2019
(dalam Juta Rupiah)

SEKTOR	ADHK		ADHB	
	2018	2019	2018	2019
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.147.142,52	1.081.388,82	1.833.240,17	1.711.505,37
Pertambangan & Penggalian	1.272,86	1.285,62	1.738,23	1.847,23
Industri Pengolahan	1.071.634,94	1.076.216,45	1.401.951,32	1.412.798,79
Pengadaan Listrik dan Gas	29.634,45	29.982,20	52.375,65	54.945,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.082,27	6.368,07	7.015,42	7.372,58
Konstruksi	3.689.398,96	3.947.683,83	5.282.791,67	6.138.416,27
Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.332.812,48	6.771.358,74	8.324.839,69	8.952.805,01
Transportasi dan Pergudangan	1.000.687,42	1.074.837,61	1.401.419,05	1.535.713,76
Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	1.345.228,88	1.430.775,31	1.888.542,32	1.963.195,15



SEKTOR	ADHK		ADHB	
	2018	2019	2018	2019
Informasi dan Komunikasi	1.266.352,23	1,345,735.30	1.182.857,01	1,201,522.09
Jasa Keuangan dan Asuransi	625.106,38	667,831.71	865.699,82	971,083.98
Real Estate	2.170.141,12	2,335,002.84	2.600.318,72	2,876,899.78
Jasa Perusahaan	186.009,77	200,341.24	266.158,12	296,430.27
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan sosial Wajib	1.030.303,16	1,094,078.93	1.763.793,20	1,924,620.30
Jasa Pendidikan	786.049,83	872,071.89	1.230.735,70	1,410,069.55
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	443.658,95	476,332.22	597.028,74	666,371.82
Jasa Lainnya	398.201,27	425,418.49	593.955,31	639,613.11
Jumlah	21.529.717,49	22,836,709.26	29.294.460,14	31,765,210.24

Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2019

Perekonomian Kota Serang ditunjang dari berbagai sektor, diantaranya perdagangan, jasa dan pariwisata. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,51%, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Banten yang sebesar 5,41% dan nasional sebesar 5,01%.

Kegiatan pertanian di Kota Serang Tahun 2019 meliputi produksi tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan komoditi perkebunan. Banyaknya lahan pertanian produktif yang berada di daerah Kecamatan Kasemen merupakan salah satu bukti bahwa Kota Serang memiliki potensi pengembangan dalam bidang pertanian. Tahun 2019 tercatat bahwa produksi tanaman padi mencapai sebanyak 46.551,66 ton Gabah Kering Giling (GKG) dengan luas panen 6.428,8 Ha, terlihat pada Tabel 1.8





Tabel 1.8
Luas Panen (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman Padi Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKG)
1.	Cipocok Jaya	380,6	3.445,98
2.	Curug	1.343,6	2.963,14
3.	Kasemen	504,4	25.805,00
4.	Serang	231,2	1.802,38
5.	Taktakan	433,8	2.687,57
6.	Walantaka	3.534,8	9.847,59
Jumlah		6.428,8	46.551,66

Sumber : Dinas Pertanian Kota Serang, Tahun 2019

Selain dari itu, sektor perikanan di Kota Serang pada Tahun 2019 menghasilkan produksi ikan mencapai 2.607,07 ton dengan rincian untuk perikanan tangkapan sebesar 1.589,41 ton dan budidaya perikanan 1.017,66 ton. Pada sektor perkebunan, potensi yang masih dapat dikembangkan yaitu komoditi kelapa, kopi, cengkeh, lada, aren dan Cacao untuk tanaman perkebunan. Sedangkan untuk jenis buah-buahan diantaranya menghasilkan durian, pisang, sawo, mangga, pepaya, jambu air dan melon. Sementara potensi peternakan yang ada adalah sapi potong, kerbau, kambing, dan domba yang cukup potensial dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Pembangunan sentra-sentra ekonomi di Kota Serang ditandai dengan banyaknya pusat perdagangan dan jasa baik dalam skala kecil ataupun besar, serta berkembangnya bisnis jasa perhotelan, restoran dan rumah makan di Kota Serang yang merupakan salah satu indikator terkait potensi pengembangan perdagangan dan jasa. Tercatat bahwa hingga saat ini terdapatdelapan pusat perdagangan modern/mall, serta enam pasar tradisional yang tersebar di Kota Serang. Keberadaan pasar/perdagangan modern tidak mengalahkan eksistensi dari keberadaan pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Serang.

Indikator lain hingga saat ini terdapat 23 hotel dan penginapan di Kota Serang, terdiri dari 2 hotel bintang empat, 1 hotel bintang tiga, 3 Hotel bintang dua, 1 hotel bintang satu dan 16 hotel kelas melati (non bintang). Tumbuhnya



restoran-restoran baik dalam kategori restoran besar, sedang dan kecil menunjukkan suatu bukti bagaimana perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Serang pada *trend* yang positif. Dengan melihat pada kenyataan dan potensi yang ada, maka pengembangan perdagangan dan jasa di Kota Serang merupakan hal yang dapat ditingkatkan dan dioptimalkan.

Pengaruh iklim perekonomian nasional dan regional cukup terasa dampaknya terhadap perekonomian Kota Serang. Posisi Kota Serang yang menjadi salah satu titik pusat perekonomian wilayah di Provinsi Banten memiliki dampak positif bagi kemajuan ekonomi sekaligus juga memiliki dampak negatif berupa potensi inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Fakta ini tampak dari tingkat inflasi di Kota Serang yang cenderung fluktuatif, yang menggambarkan besarnya pengaruh faktor eksternal ekonomi pada satu sisi serta lemahnya penyesuaian perekonomian daerah terhadap akibat faktor-faktor eksternal tersebut.

Pemerintah Kota Serang optimis para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Kota Serang. Data dari DPMPTSP Kota Serang mencantumkan nilai investasi di Kota Serang pada Tahun 2019 mencapai Rp.3.899,08 Milyar dengan jumlah proyek sebanyak 1.797 proyek dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10.448 orang seperti terlihat pada tabel 1.9 sebagai berikut:

Tabel 1.9
Perkembangan Investasi/Penanaman Modal Kota Serang
Tahun 2015 -2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Investasi	Milyar Rp	4.508,18	3.664,7	4.643,78	5.204,48	3.899,08
Jumlah Investor	Proyek	1.338	1.837	1.260	891	1.797
Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	6.224	5.869	12.197	6.335	10.448

Sumber : DPMPTSP Kota Serang, Tahun 2019



F. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah, terdiri dari unit kerja, yaitu :

- a. Asisten Pemerintahan
- b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- c. Asisten Administrasi Umum

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Inspektorat

4. Dinas Daerah, yaitu:

- a. Dinas Kesehatan
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- e. Dinas Sosial
- f. Dinas Perhubungan
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang;
- i. Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- j. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- l. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- n. Dinas Pertanian
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





5. Badan Daerah, yaitu:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Serang
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

6. Satuan Polisi Pamong Praja

7. Sekretariat Korpri.

8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

9. Kecamatan, yaitu :

- a. *Kecamatan Serang*, mencakup Serang, Kelurahan Cipare, Kota Baru, Lontar Baru, Kagungan, Lopang, Unyur, Kali Gandu, Sumur Pecung, Cimuncang, Suka Wana, Terondol dan Kelurahan Serang;
- b. *Kecamatan Cipocok Jaya*, mencakup Kelurahan Dalung, Tembong, Karundang, Cipocok Jaya, Penancangan, Gelam, Banjar Sari dan Kelurahan Banjar Agung;
- c. *Kecamatan Kasemen*, mencakup Kelurahan Kasunyatan, Margaluyu, Kasemen, Banten, Warung Jaud, Mesjid Priayi, Bendung, Sawah Luhur, Kilasah dan Kelurahan Terumbu;
- d. *Kecamatan Curug*, mencakup Kelurahan Cilaku, Sukajaya, Kamanisan, Curug, Suka Laksana, Cipete, Sukawana, Curug Manis Tinggar dan Kelurahan Pancalaksana
- e. *Kecamatan Walantaka*, mencakup Kelurahan Walantaka, Kepuren, Kalodran, Kiara, Nyapah, Tegal Sari, Pabuaran, Pagar Agung, Pengampelan, Pipitan, Teritih, Pasuluhan, Cigoong dan Kelurahan Lebak Wangi;
- f. *Kecamatan Taktakan*, mencakup Kelurahan Taman Baru, Drangong, Panggung jati, Kuranji, Sepang, Sayar, Cilowong, Pancur, Kalanganyar, Taktakan, Umbul Tengah, Lialang dan Cibendung





G. SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang Tahun 2019 sebanyak 4.236 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.501 orang dan perempuan sebanyak 2.735 orang, sebagaimana tabel 1.10 berikut:

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

Ruang	Jenis Kelamin									
	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
A	0	0	18	6	106	218	266	395	390	619
B	0	0	27	17	159	333	229	569	415	919
C	2	0	51	64	317	582	35	18	405	664
D	1	0	16	29	271	504	3	0	291	533
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	3	0	112	116	853	1637	533	982	1501	2735
TOTAL									4236	

Sumber : BKPSDM Kota Serang, Tahun 2019

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1.11 berikut:





Tabel 1.11
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		%
		L	P	
1.	SD / Sederajat	3	0	0,07
2.	SLTP / Sederajat	16	0	0,38
3.	SLTA / Sederajat	97	72	3,99
4.	SLTA Kejuruan	13	16	0,68
5.	Diploma I	2	6	0,19
6.	Diploma II	55	82	3,23
7.	Diploma III	51	185	5,57
8.	Diploma IV	9	68	1,82
9.	Strata I	896	1986	68,04
10.	Strata II	354	320	15,91
11.	Strata III	5	0	0,12
TOTAL		1501	2735	100

Sumber : BKPSDM Kota Serang, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Kota Serang yang memperoleh pendidikan Strata 1 menduduki peringkat pertama dengan 68,04%, disusul pendidikan Strata II sebesar 15,91%.

H. ISU STRATEGIS KOTA SERANG

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen pelaporan, karena menjadi dasar utama pada perumusan arah perencanaan yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam tahun-tahun mendatang. Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan maka dalam perumusan permasalahan dan isu strategis Kota Serang perlu memperhatikan permasalahan dan isu strategis pemerintah pusat maupun Provinsi Banten.

Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah





dan panjang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan rencana pembangunan Kota Serang.

Atas dasar penelaahan terhadap dokumen-dokumen perencanaan nasional, Provinsi Banten dan Kota Serang, maka isu strategis Kota Serang adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan demografi dan letak geografis Kota Serang

Sebagai ibu kota Provinsi Banten serta berada pada lintasan antar kota di wilayah Provinsi Banten dan lintasan antar Jawa-Sumatera, Kota Serang berpotensi menarik minat pendatang untuk tinggal di Kota Serang yang akan berpengaruh tidak hanya terhadap pertumbuhan penduduk, namun juga mempengaruhi kehidupan social ekonomidan lingkungan, khususnya dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta upaya penyediaan infrastruktur dasar.

2. Kota Metropolitan Serang

Pembangunan Kota Metropolitan Serang menjadi bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang akan menjadikan Kota Serang yang lebih maju, cerdas dan berkelanjutan. Untuk membangun Kota Metropolitan Serang perlu upaya pembangunan menyeluruh yaitu pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan pemenuhan infrastruktur wilayah, hal ini diperlukan dalam upaya mengurangi dampak yang kurang baik dari pembangunan Kota Metropolitan Serang. Namun demikian diyakini apabila pembangunan Kota Metropolitan Serang nantinya dapat meningkatkan daya saing Kota Serang di segala sektor pembangunan.

3. Kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat berfokus pada pembangunan pendidikan dan kesehatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dan penanggulangan





permasalahan sosial yang masih menjadi permasalahan pembangunan di Kota Serang.

4. Daya saing perekonomian daerah

Peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dimaksudkan untuk menjadikan Kota Serang memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dengan daerah lain ataupun dalam menghadapi tantangan perekonomian regional, nasional dan global. Upaya peningkatan daya saing perekonomian daerah Kota Serang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sektor potensial, yaitu Pariwisata, Budaya, Perdagangan dan Jasa, UKM dan Koperasi, Pertanian, Ketahanan Pangan, Ekonomi kreatif, dan Investasi dengan peningkatan pengelolaan BUMD untuk pelayanan publik dan peningkatan potensi PAD. Selain itu, peningkatan daya saing perekonomian daerah dapat dicapai dengan penguatan fungsi kelitbangan dan sistem inovasi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

5. Infrastruktur wilayah

Peningkatan infrastruktur wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kenyamanan masyarakat Kota Serang, yaitu peningkatan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan), penanganan sampah, kemacetan, titik banjir dan/atau genangan air, drainase dan irigasi serta sarana prasarana perumahan dan permukiman.

6. Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana dalam kerangka penataan Kota Serang yang berkelanjutan sertaantisipasi terhadap potensi bencana dan perkembangan pengelolaan tata ruang wilayah.

7. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi diarahkan pada rangka peningkatan pelayanan publik dan e-government dalam upaya memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat atas pelayanan publik serta pemerintahan yang baik dan bersih.





**BAB
02**

**PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 – 2023

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

RPJMD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu–isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

1. VISI

Berdasarkan kondisi Kota Serang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Serang Tahun 2018 – 2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN
BERBUDAYA”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Serang sebagai ibukota Provinsi Banten ke depan menjadi kota peradaban yang ditandai keberdayaan sumberdaya manusia, pemerintahan, dan pembangunan





lingkungannya. Kota yang memiliki kehandalan daya saing dan maju dalam pendidikan, perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Kota **Peradaban** dimaknai sebagai *Civil Society* yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri:

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.





Kota **Berdaya**, mengandung arti bahwa Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang.

Kota **Berbudaya**, mempunyai arti bahwa setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang yang diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah hinterland-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.





Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar Bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

“Aje Kendor Membangun Serang”

Makna slogan **Aje Kendor Membangun Serang** diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan **Peradaban**, yang merupakan akronim dari:

Kota Serang yang **Partisipatif** adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan warga Kota Serang sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (*Good Governance dan Clean Government*).

Kota Serang yang **Edukatif** dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.





Kota Serang yang **Religius** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

Kota Serang yang **Akuntabel** adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kota Serang yang **berDaya** saing adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan Nasional.

Kota Serang yang **berBudaya** adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Kota Serang yang **Aman** dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (*self-help*) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya





pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kota Serang yang **Nyaman** adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari-hari) serta *transcendental* (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

Fokus kerja tersebut memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep Think Globally Act Locally, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Kota Serang diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota Serang namun dengan orientasi hasil yang berskala regional, nasional atau internasional.

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- 1) **Menguatkan peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan**, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan kebudayaan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
- 2) **Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan Lingkungan**, dengan memantapkan penataan kota, membangun infrastruktur dasar wilayah, melalui manajemen perencanaan ruang kota yang memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan kelestariannya.





- 3) **Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing**, dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat pengangguran dan memperluas lapangan kerja, melalui peningkatan daya saing daerah.
- 4) **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan menghadirkan pemerintahan yang merakyat dan memiliki semangat perubahan yang didukung oleh teknologi informasi komunikasi (TIK) sebagai penggerak birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab, membangkitkan partisipasi warga kota serang, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2018 – 2023 ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia dengan target 73,92 poin

Sasaran 1:

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, dengan indikator:

- a. Rata-rata Lama Sekolah dengan target 8,68 tahun
- b. Harapan Lama Sekolah dengan target 12,77 tahun

Sasaran 2:

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan target 68,75 tahun

Sasaran 3:

Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dengan target 1,00 %





Tujuan 2 : Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah, dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah, dengan target 70,00 poin

Sasaran 4:

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, dengan indikator Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah dengan target 83 %

Sasaran 5:

Menurunnya luasan kawasan kumuh, dengan indikator Persentase Kawasan Kumuh dengan target 1,07 %

Sasaran 6:

Menurunnya kemacetan lalu lintas, dengan indikator Persentase Potensi Titik Kemacetan dengan target 12 %

Tujuan 3 : Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 51,30 poin

Sasaran 7:

Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator:

- a. Indeks Kualitas Mutu Udara dengan target 48 poin
- b. Indeks Kualitas Mutu Air dengan target 71 poin
- c. Indeks Kualitas Mutu Tutupan Lahan dengan target 39 poin

Sasaran 8:

Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana, dengan indikator cakupan penanggulangan bencana dengan target 100 %

Tujuan 4 : Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah, dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target 6,91 %





Sasaran 9:

Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat, dengan indikator:

- a. Tingkat inflasi daerah, dengan target 3 – 5 %
- b. Indeks daya beli, dengan target 83,61 poin
- c. PDRB per Kapita, dengan target 52,50 juta rupiah
- d. Indeks Ketimpangan Regional Wiliamson, dengan target 0,50 poin
- e. Angka kemiskinan, dengan target 4,86 %
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan target 7,93 %

Tujuan 5 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Daerah dengan target 80,00 poin

Sasaran 10:

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan target 81 poin
- b. Nilai LPPD Kota, dengan target Sangat Tinggi
- c. Hasil Evaluasi AKIP, dengan target BB
- d. Hasil LKPD, dengan target WTP





Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kota Serang

Visi: TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA			
Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	2	3	4
Misi 1 : Memperkuat Peradaban yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan			
Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
			Harapan Lama Sekolah
		b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
		c. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan			
1. Tepenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah
		b. Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh
		c. Menurunnya kemacetan lalu lintas	Persentase potensi titik kemacetan





Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	2	3	4
2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	a. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	a. Indeks kualitas mutu udara
			b. Indeks kualitas mutu air
			c. Indeks kualitas mutu tutupan lahan
		b. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing			
Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	a. Tingkat Inflasi Daerah
			b. Indeks daya beli
			c. PDRB per kapita
			d. Indeks Ketimpangan Regional Wiliamson
			e. Angka Kemiskinan
			f. Tingkat Pengangguran Terbuka





Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	2	3	4
Misi 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Indeks Kepuasan Masyarakat b. Nilai LPPD Kota c. Hasil Evaluasi AKIP d. Hasil LKPD

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Serang Tahun 2018 – 2023, digunakan 38 (tiga puluh delapan) strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan
- 2) Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan perpustakaan
- 4) Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya lokal
- 5) Pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat
- 6) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
- 7) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 8) Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga





- 9) Peningkatan infrastruktur bidang pekerjaan umum berupa peningkatan fasilitas umum dan gedung pemerintahan, jalan dan jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
- 10) Peningkatan infrastruktur dan layanan teknologi informasi komunikasi penunjang implementasi smart city Kota Serang
- 11) Peningkatan pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian perumahan dan permukiman
- 12) Peningkatan pengendalian lalu lintas, pelayanan angkutan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- 13) Penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan persampahan
- 14) Peningkatan penataan dan pengendalian ruang sesuai rencana tata ruang
- 15) Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, darurat bencana, serta perencanaan pemulihan pasca bencana
- 16) Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah
- 17) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan UMKM
- 18) Peningkatan pertumbuhan perdagangan, stabilitas harga dan pasokan, serta pengelolaan pasar
- 19) Pengembangan dan pembinaan usaha, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, serta penguatan jaringan cluster industri
- 20) Peningkatan produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- 21) Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah
- 22) Pengembangan destinasi, sumber daya dan promosi pariwisata
- 23) Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan daya saing, pengendalian dan pengawasan penanaman modal





- 24) Peningkatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial
- 25) Peningkatan perluasan kesempatan kerja dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial
- 26) Peningkatan fasilitasi kebijakan untuk mendorong kualitas administrasi dan kelembagaan pemerintahan daerah
- 27) Peningkatan pelayanan e-government, informasi publik dan penyediaan data statistik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- 28) Peningkatan sistem layanan pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan, penyediaan data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
- 29) Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan
- 30) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan perijinan yang prima dan responsif
- 31) Peningkatan pelayanan dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 32) Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian
- 33) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
- 34) Pengelolaan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas
- 35) Optimalisasi penelitian dan pengembangan kebijakan strategi dan inovasi daerah guna mencapai perencanaan pembangunan yang berkualitas
- 36) Peningkatan akuntabilitas penyusunan dan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah





- 37) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- 38) Penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur kecamatan dan kelurahan

Adapun hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Serang dapat dilihat dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 2.2
Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Kota Serang

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Misi 1 : Menguatkan Peradaban yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan		
Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan dasar, pendidikan usia dini dan pendidikan kesetaraan
		b. Peningkatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan masyarakat
		c. Peningkatan akses dan kualitas pengelolaan perpustakaan
		d. Peningkatan kualitas dan implementasi seni budaya local
		e. Pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
		b. Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak





Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
	3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Pengendalian pertumbuhan penduduk serta pelayanan keluarga berencana dan ketahanan keluarga
Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan		
1. Tepenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	a. Peningkatan infrastruktur bidang pekerjaan umum berupa peningkatan fasilitas umum dan gedung pemerintahan, jalan dan jembatan, saluran drainase/gorong-gorong, jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya b. Peningkatan infrastruktur dan layanan teknologi informasi komunikasi penunjang implementasi smart city Kota Serang
	2. Menurunnya luasan kawasan kumuh	Peningkatan pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian perumahan dan permukiman
	3. Menurunnya kemacetan lalu lintas	Peningkatan pengendalian lalu lintas, pelayanan angkutan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
	2. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana		Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, darurat bencana, serta perencanaan pemulihan pasca bencana





Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing		
Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	a. Peningkatan fasilitas kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah
		b. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan UMKM
		c. Peningkatan pertumbuhan perdagangan, stabilitas harga dan pasokan, serta pengelolaan pasar
		d. Pengembangan dan pembinaan usaha, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, serta penguatan jaringan cluster industry
		e. Peningkatan produksi, bina usaha dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		f. Peningkatan pemantapan ketahanan pangan daerah
		g. Pengembangan destinasi, sumber daya dan promosi pariwisata
		h. Peningkatan investasi daerah melalui peningkatan daya saing, pengendalian dan pengawasan penanaman modal
		i. Peningkatan penanganan dan pemberdayaan sosial bagi PMKS, serta penguatan kelembagaan kesejahteraan social
		j. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dengan peningkatan kualitas dan





Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
		produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial dan peningkatan jaminan social
Misi 4 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Peningkatan fasilitas kebijakan untuk mendorong kualitas administrasi dan kelembagaan pemerintahan daerah
		b. Peningkatan pelayanan e-government, informasi publik dan penyediaan data statistik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
		c. Peningkatan sistem layanan pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan, penyediaan data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
		d. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan kependudukan
		e. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan perijinan yang prima dan responsive
		f. Peningkatan pelayanan dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
		g. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur, dan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian





Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
		h. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
		i. Pengelolaan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas
		j. Optimalisasi penelitian dan pengembangan kebijakan strategi dan inovasi daerah guna mencapai perencanaan pembangunan yang berkualitas
		k. Peningkatan akuntabilitas penyusunan dan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
		l. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
		m. Penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur kecamatan dan kelurahan

Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur serta pendayagunaan kondisi dan potensi yang dimiliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kota peradaban dengan prioritas pembangunan RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah
3. Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang dan mitigasi bencana





4. Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi

Arah kebijakan pembangunan Kota Serang 2018-2023, beserta keterkaitannya dengan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam BAB VI lampiran Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

5. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, kebijakan perencanaan pembangunan Kota Serang Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 802 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2019. RKPD Kota Serang Tahun 2019 merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2019.

6. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kota Serang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.





Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.273–Huk/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Adapun IKU Pemerintah Kota Serang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
1. Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup





Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
	3. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
2. Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah
	1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur wilayah
	2. Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh
	3. Menurunnya kemacetan lalu lintas	Persentase potensi titik kemacetan
3. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan		Indeks kualitas lingkungan hidup
	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	a. Indeks kualitas mutu udara
		b. Indeks kualitas mutu air
		c. Indeks kualitas mutu tutupan lahan
2. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana	
4. Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi
	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	a. Tingkat Inflasi Daerah
		b. Indeks daya beli
		c. PDRB per kapita
		d. Indeks Ketimpangan Regional Wiliamson
		e. Angka Kemiskinan
		f. Tingkat Pengangguran Terbuka





Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	2	3
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah
		a. Indeks Kepuasan Masyarakat
		b. Nilai LPPD Kota
		c. Hasil Evaluasi AKIP
		d. Hasil LKPD

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2019, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2019. Pemerintah Kota Serang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:





Misi 1 : Memperkuat Peradaban Yang Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,07
	a. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,63
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67
	b. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,80
	c. Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,08

Misi 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah Yang Berwawasan Lingkungan

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	57,70
	a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	71
	b. Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	%	2,01
	c. Menurunnya kemacetan lalu lintas	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	40





No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019
1	2	3	4	5
2.	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	50,20
	a. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Mutu Udara	Poin	53
		Indeks kualitas mutu air	Poin	65
		Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	37
	b. Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana	%	100

Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan local daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,51
	a. Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3-5
		Indeks daya beli	Poin	79,59
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)	44,5
		Indeks ketimpangan regional Williamson	Poin	0,54
		Angka Kemiskinan	%	5,26
		Tingkat pengangguran terbuka	%	8,08





Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

No.	Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target 2019
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	70,00
	a. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	73,00
		Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat tinggi
		Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	B
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Serang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang yang berada pada OPD kinerja yang diperjanjikan oleh Walikota Serang, dengan total belanja langsung urusan sebesar Rp.659,734,018,634

Anggaran belanja langsung merupakan bagian dari APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2019, komposisi belanja APBD Kota Serang, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun 2019

No.	Uraian	Rencana (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	629.009.184.585	43,93
2.	Belanja Langsung	802.924.438.674	56,07
Jumlah		1.431.933.623.259	100

Sumber : Perwal Kota Serang Nomor 48 Tahun 2019





Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Alokasi Per Sasaran Strategis Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	144.079.410.397	17,94
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	107.348.591.919	13,37
3.	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	5.005.654.000	0,62
4.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	109.765.382.960	13,67
5.	Menurunnya luasan kawasan kumuh	46.683.442.055	5,81
6.	Menurunnya kemacetan lalu lintas	16.201.849.400	2,02
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	36.048.212.990	4,49
8.	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	1.574.825.000	0,20
9.	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	30.910.488.820	3,85
10.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	305.306.581.133	38,02
Jumlah		802.924.438.672	100

Sumber : Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Kota Serang Tahun 2019 (diolah)





**BAB
03**

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Serang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Serang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

No	Nilai Interval	Kinerja Pelayanan
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah





A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Serang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Serang melalui Keputusan Walikota Serang Nomor: 060/Kep.273-Huk/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2019. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Serang perlu memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

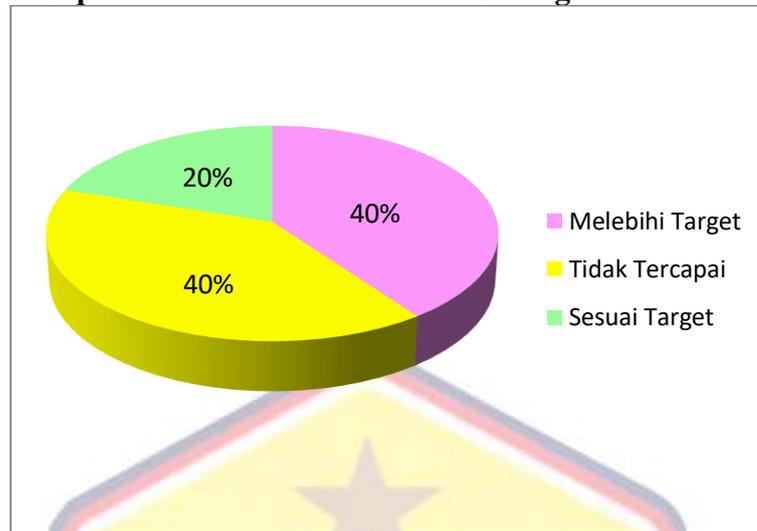
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Serang Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1 : Memperkuat peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan					
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,07	72,10	100,04
Misi 2 : Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan					
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	57,70	57,71	100,02
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	50,20	47,35	94,32
Misi 3 : Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing					
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,51	6,51	100
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik					
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	70,00	59,14	84,49





Grafik 3.1
Capaian IKU Pemerintah Kota Serang Tahun 2019



Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2019 (diolah)

Hasil dari capaian tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Kota Serang yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Serang. Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Serang 2018-2023, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pencapaian kinerja terhadap Janji Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan.

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur





Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Serang Nomor 58 Tahun 2017. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Serang dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Serang Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2018-2023, telah ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1.	Sasaran 1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	:	2 indikator
2.	Sasaran 2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	:	1 indikator
3.	Sasaran 3	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	:	1 indikator
4.	Sasaran 4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	:	1 indikator
5.	Sasaran 5	Menurunnya luasan kawasan kumuh	:	1 indikator
6.	Sasaran 6	Menurunnya kemacetan lalu lintas	:	1 indikator
7.	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	:	3 indikator





8.	Sasaran 8	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	:	1 indikator
9.	Sasaran 9	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	:	6 indikator
10.	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	:	4 indikator

Secara umum Pemerintah Kota Serang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Serang Tahun 2019

No	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,63	8,67	100,46
		2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67	12,77	100,79
2.	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	3.	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,80	67,83	100,04
3.	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	4.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,08	1,59	67,92
4.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	5.	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	71	70,96	99,94
5.	Menurunnya luasan kawasan kumuh	6.	Persentase Kawasan Kumuh	%	2,01	1,44	139,58
6.	Menurunnya kemacetan lalu lintas	7.	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	40	44	90,91





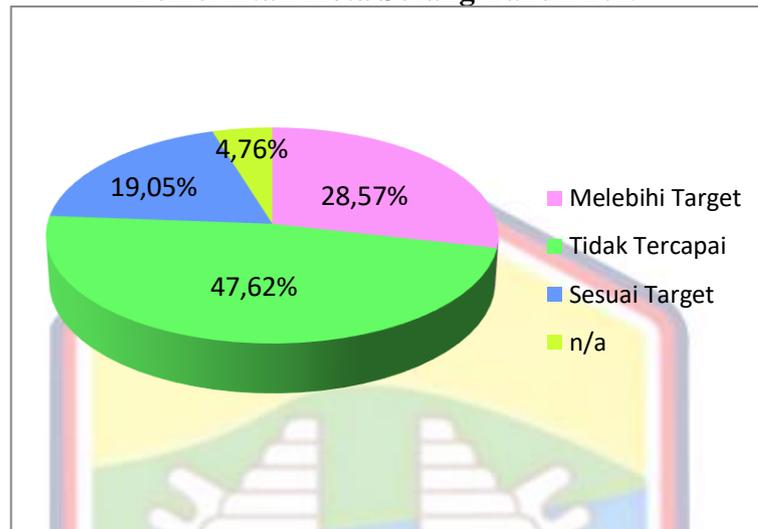
No	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		
					Target	Realisasi	Capaian
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	8.	Indeks Kualitas Mutu Udara	Poin	53	67,20	78,87
		9.	Indeks kualitas mutu air	Poin	65	51,05	78,54
		10.	Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	37	29,70	80,27
8.	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	11.	Cakupan penanggulangan bencana	%	100	100	100
9.	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	12.	Tingkat inflasi daerah	%	3 – 5	3,06	100
		13.	Indeks daya beli	Poin	79,59	79,12	99,41
		14.	PDRB kapita Per	Juta (Rp)	44,5	42,29	95,03
		15.	Indeks ketimpangan regional Williamson	Poin	0,54	0,45	120
		16.	Angka Kemiskinan	%	5,26	5,28	99,62
		17.	Tingkat pengangguran terbuka	%	8,08	8,08	100
10.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	18.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	73,00	77,80	106,58
		19.	Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
		20.	Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	B	CC	91,60
		21.	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	n/a	-





Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2019 sebagaimana grafik 3.2 dan tabel 3.3 berikut:

Grafik 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Serang Tahun 2019



Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2019 (diolah)

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kota Serang Tahun 2019

No	Predikat	Rata-rata % Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat Tinggi	91 % ≤ 100 %	16
2	Tinggi	76 % ≤ 90 %	3
3	Sedang	66 % ≤ 75 %	1
4	Rendah	51 % ≤ 65 %	-
5	Sangat Rendah	≤ 50 %	-
Jumlah			20

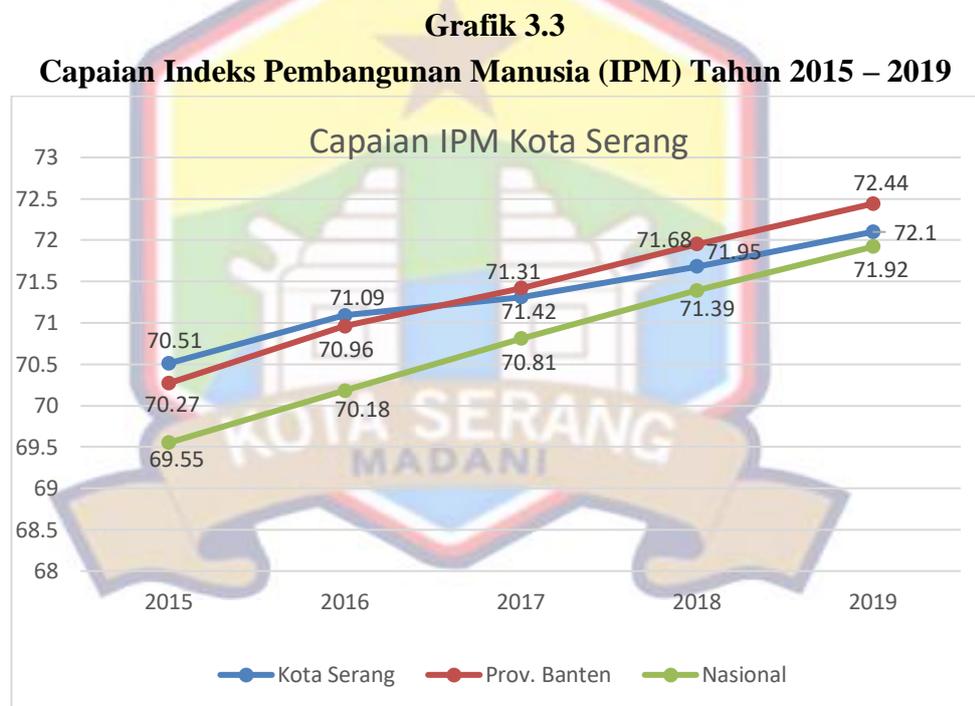
Keterangan: 1 indikator tidak tersedia data (n/a) yaitu Opini BPK





1. Tujuan Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya

Tujuan Daerah terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya dicapai dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang tahun 2019 tercapai sebesar 72,10 meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,68. IPM Kota Serang tahun 2019 lebih tinggi dari IPM Nasional sebesar 71,92 namun masih di bawah IPM Prov. Banten sebesar 72,44 seperti terlihat dalam grafik 3.3 berikut:



Tujuan daerah tersebut ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut:

a. Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Untuk mewujudkan pembangunan dalam suatu daerah tentunya perlu didukung oleh segenap potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut.





Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,63	8,67	100,46
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65	12,67	12,77	100,79
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						100,63

Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat melalui 2 indikator kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 100,63%, meningkat dibandingkan kondisi awal tahun 2018 di mana rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,05 dan harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,12. Peningkatan tersebut diantaranya karena Pemerintah Kota Serang telah membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

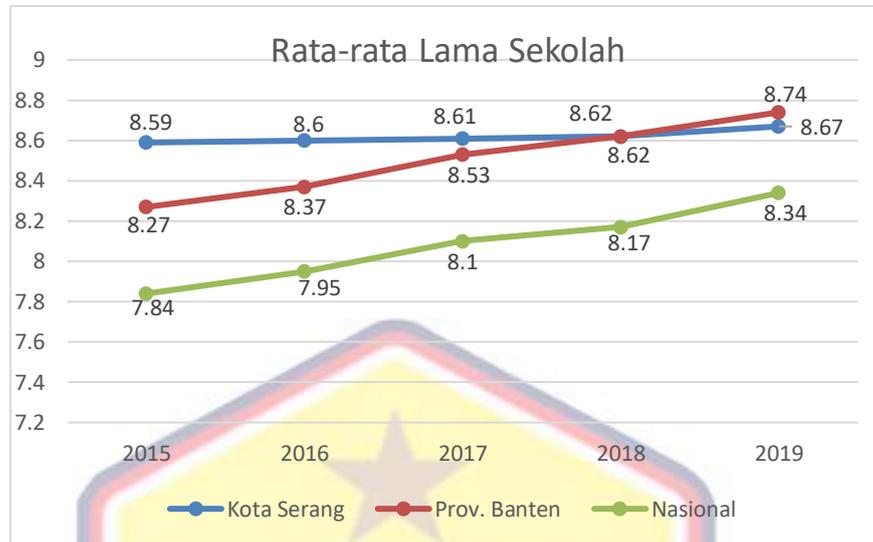
No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,68	8,67	99,88
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,77	12,77	100
Rata-rata terhadap RPJMD					99,94

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk rata-rata lama sekolah adalah 99,88% dari target akhir RPJMD 8,68 dan harapan lama sekolah sebesar 100% dari target akhir RPJMD 12,77. Adapun grafik capaian selama lima tahun sebagai berikut:



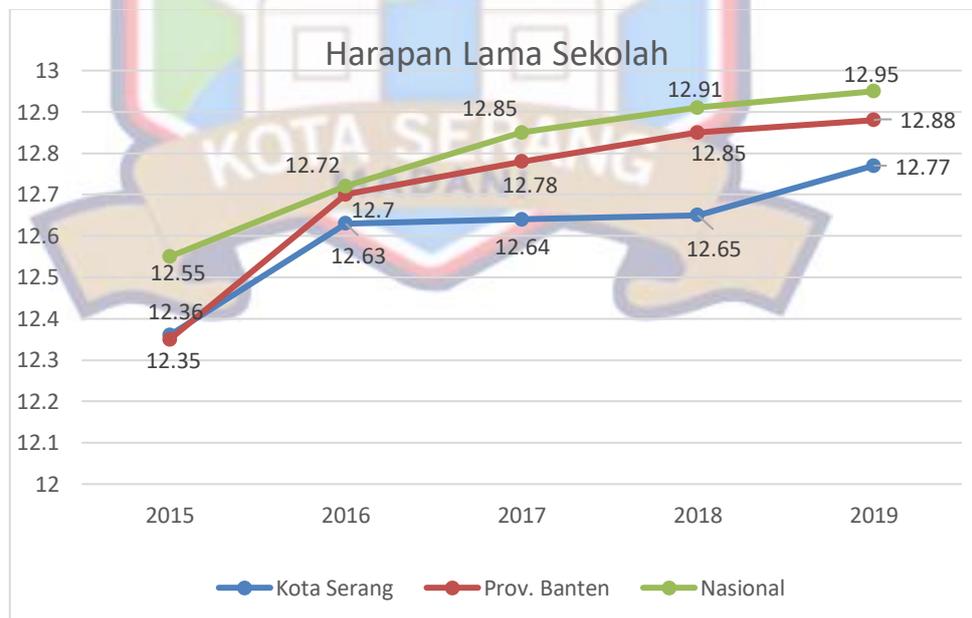


Grafik 3.4
Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2015–2019



Sumber : BPS Pusat, Prov. Banten, Kota Serang, Tahun 2019

Grafik 3.5
Harapan Lama Sekolah Kota Serang Tahun 2015–2019



Sumber : BPS Pusat, Prov. Banten, Kota Serang, Tahun 2019

Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang tahun 2019 adalah sebesar 8,67 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk usia sekolah (7 tahun atau lebih) di Kota Serang dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 SLTP. Meskipun





dapat memenuhi target tahun 2019 sebesar 8,63 tahun namun untuk mencapai target rata-rata bersekolah 9 tahun masih membutuhkan upaya lebih kerja keras lagi dari Pemerintah Kota Serang. Rata-rata Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 8,74 dan di atas Nasional yaitu 8,34.

Harapan Lama Sekolah Kota Serang tahun 2019 adalah sebesar 12,77 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) di masa mendatang adalah selama 12,77 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA. Harapan Lama Sekolah Kota Serang juga masih di bawah Provinsi Banten yang mencapai 12,88 dan Nasional yaitu 12,95.

b. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Kesehatan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Serang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,58	67,80	67,83	100,04
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						100,04

Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2019 adalah sebesar 100,04% meningkat dari tahun 2018, di mana kondisi awal sebesar 67,58 menjadi 67,83 di tahun 2019. Peningkatan ini merupakan usaha yang optimal dari Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program-program kesehatan.



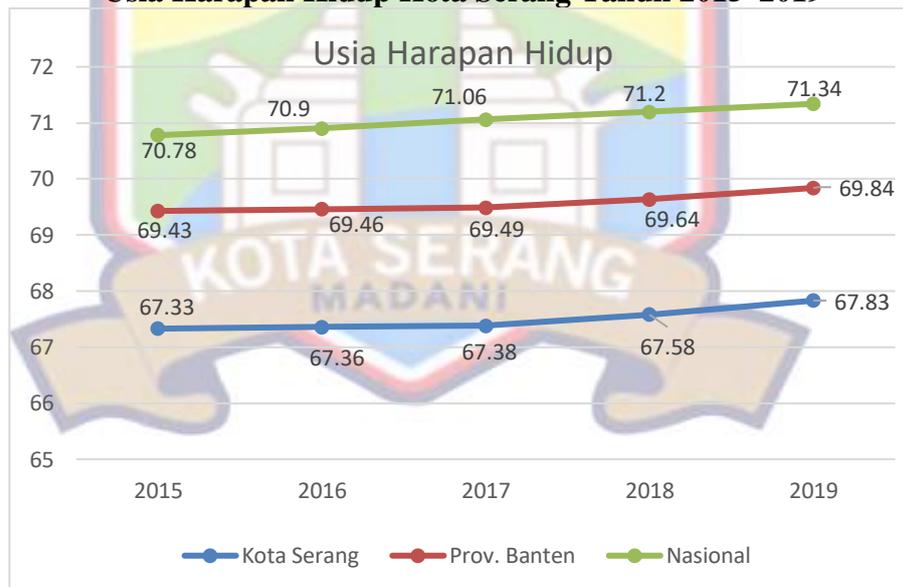


Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,75	67,83	98,66
Rata-rata terhadap RPJMD					98,66

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk Usia Harapan Hidup adalah 98,66% dari target akhir RPJMD 68,75. Adapun grafik capaian kinerja selama lima tahun sebagaimana berikut:

Grafik 3.6
Usia Harapan Hidup Kota Serang Tahun 2015–2019



Sumber : BPS Pusat, Prov. Banten, Kota Serang, Tahun 2019

Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.





Usia harapan hidup dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 telah mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Usia Harapan Hidup tercapai sebesar 67,83. Pencapaian tersebut masih di bawah angka Provinsi Banten yang mencapai 69,84 dan angka Nasional 71,34. Permasalahan dalam pencapaian indikator ini adalah pola hidup tidak sehat khas warga perkotaan yang modern. Solusi atas permasalahan tersebut tentunya dengan upaya preventif, kuratif (pengobatan), dan promotif (ajakan untuk hidup sehat).

c. Sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki daerah. Sasaran Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk di Kota Serang diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Terkendalinya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,68	1,08	1,59	67,92
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						67,92

Capaian kinerja sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk tahun 2019 adalah sebesar 67,92% meningkat dari tahun 2018, di mana kondisi awal sebesar 1,68 menjadi 1,59 di tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Serang sangat pesat dan belum mampu menghambat laju pertumbuhan penduduk yang ditargetkan yaitu 1,08 pada tahun 2019 namun masih belum mencapai target karena realisasi tahun 2019 sebesar 1,59 masih di atas toleransi yang ditargetkan.





Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Terkendalanya Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas Pertumbuhan Penduduk Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,00	1,59	62,89
Rata-rata terhadap RPJMD					62,89

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk Laju Pertumbuhan Penduduk adalah 62,89% dari target akhir RPJMD 1,00. Adapun grafik capaian kinerja selama lima tahun sebagaimana berikut:

Grafik 3.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Serang Tahun 2015–2019



Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2019

Walaupun jumlah penduduk Kota Serang terus meningkat selama sepuluh tahun mendatang, akan tetapi laju pertumbuhan penduduk Kota Serang menunjukkan kecenderungan yang terus menurun. Dalam periode 2015-2019, laju pertumbuhan penduduk Kota Serang turun dari 1,92 persen menjadi 1,59 persen (grafik 3.7).





Turunnya laju pertumbuhan penduduk Kota Serang ini ditentukan oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi, di mana laju pertumbuhan penduduk Kota Serang menempati peringkat kelima di Provinsi Banten (BPS Prov. Banten, 2019).

2. Tujuan terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah

Tujuan daerah terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dicapai dengan meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Serang. Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu tools yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (outcome).

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang diperoleh dengan survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Serang dengan mutu pelayanan terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1,00 – 2,99	10,00 – 29,99	D	Sangat Tidak Puas
3,00 – 4,99	30,00 – 49,99	C	Tidak Puas
5,00 – 6,99	50,00 – 69,99	C+	Cukup Puas
7,00 – 8,99	70,00 – 89,99	B	Puas
9,00 – 10	90,00 – 100	A	Sangat Puas

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Serang tahun 2019 tercapai sebesar 57,71. Apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Pelayanan Infrastruktur di Kota Serang adalah “Cukup Puas” atau dengan skor C+. Adapun rincian IKLI per Kecamatan se-Kota Serang tahun 2019 dapat dilihat ditabel 3.1 berikut:





Tabel 3.10
Nilai IKLI Kecamatan se-Kota Serang Tahun 2019

Kecamatan	Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Serang	58,75	C+	Cukup Puas
Taktakan	42,27	C	Tidak Puas
Cipocok Jaya	59,93	C+	Cukup Puas
Walantaka	53,20	C+	Cukup Puas
Kasemen	55,65	C+	Cukup Puas
Curug	55,27	C+	Cukup Puas
Kota Serang	57,71	C+	Cukup Puas

Sumber : Bappeda Kota Serang, Tahun 2019

Faktor yang menyebabkan masih rendahnya atau kurang puasnya terhadap infrastruktur di Kota Serang adalah:

1. Masyarakat masih minim informasi akan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Serang
2. Kurang terawatnya fasilitas infrastruktur yang ada di Kota Serang, lebih banyak cenderung pada masalah jalan, sedangkan dari sisi lain yang dimaksud dengan infrastruktur bukan semata terpaku pada jalan tetapi masih banyak indikator-indikator lainnya.
3. Perawatan dari hasil pembangunan yang dirasa kurang baik, sehingga terkesan pemerintah acuh dan lalai dalam hal perawatan infrastruktur yang ada di Kota Serang.
4. Banyak permasalahan yang dirasa kurang cepat diatasi oleh Pemerintah Kota Serang, masalah-masalah tersebut masuk dalam beberapa indikator dan isu strategis yang seyognya dapat cepat di tanggulangi oleh Pemerintah Kota Serang.

Tujuan daerah terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah ditunjang dengan sasaran strategis pembangunan Kota Serang sebagai berikut:





a. Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah

Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah di Kota Serang diukur dengan indikator tingkat kemantapan infrastruktur wilayah dengan capaian 70,96% dari target yang ditetapkan sebesar 71% seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1.	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	68,6	71	70,96	99,94
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						99,94

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah tahun 2019 adalah sebesar 99,94% meningkat dari tahun 2018, di mana kondisi awal tingkat kemantapan infrastruktur wilayah sebesar 68,6 menjadi 70,96 di tahun 2019. Peningkatan ini merupakan hasil program peningkatan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Serang.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	83	70,96	85,49
Rata-rata terhadap RPJMD					85,49

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk tingkat kemantapan infrastruktur wilayah adalah 85,49% dari target akhir RPJMD 83.



**b. Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh**

Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh di Kota Serang diukur dengan indikator persentase kawasan kumuh dengan capaian 1,44% dari target yang ditetapkan sebesar 2,01% seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1.	Persentase Kawasan Kumuh	%	2,02	2,01	1,44	139,58
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						139,58

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

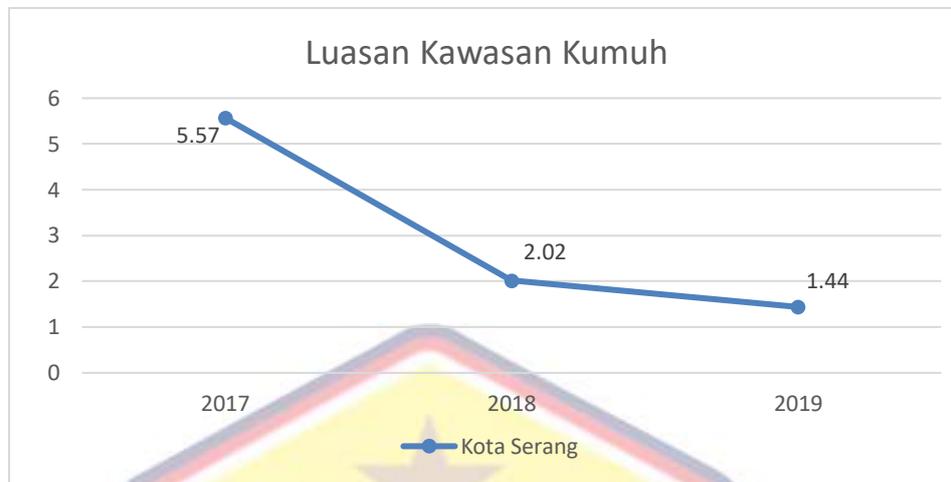
No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Persentase Kawasan Kumuh	%	1,07	1,44	74,31
Rata-rata terhadap RPJMD					74,31

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk persentase kawasan kumuh adalah 74,31% dari target akhir RPJMD 1,07. Adapun capaian persentase kawasan kumuh di Kota Serang selama tiga tahun ke belakang tersaji pada grafik 3.8 berikut:





Grafik 3.8
Luasan Kawasan Kumuh Kota Serang Tahun 2017–2019



Sumber : DPRKP Kota Serang, Tahun 2019

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Serang, kawasan kumuh di Kota Serang untuk tahun 2019 mencapai 384,51 Ha atau menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 538,75 Ha dari luas wilayah Kota Serang sebesar 26.674 Ha. Menurunnya jumlah kawasan kumuh di Kota Serang merupakan hasil dari program prioritas Walikota Serang yaitu menata PKL dan RTH.

c. Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas

Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas di Kota Serang diukur dengan indikator Persentase Potensi Titik Kemacetan dengan capaian 46% dari target yang ditetapkan sebesar 40% seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1.	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	50	40	44	90,91
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						90,91





Tabel 3.16
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemacetan Lalu Lintas
Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	12	44	27,27
Rata-rata terhadap RPJMD					27,27

Capaian terhadap target akhir RPJMD untuk persentase potensi titik kemacetan di tahun pertama RPJMD adalah 27,27% dari target akhir RPJMD 12. Adapun capaian persentase potensi titik kemacetan di Kota Serang selama lima tahun ke belakang tersaji pada grafik 3.9 berikut:

Grafik 3.9
Persentase Potensi Titik Kemacetan Tahun 2015–2019



Sumber : Dishub Kota Serang, Tahun 2019

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Serang, titik kemacetan di Kota Serang sebanyak 25 titik. Pada tahun 2019 ini yang bisa diatasi sebanyak 14 titik atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebanyak 12 titik kemacetan. Peningkatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Serang mewujudkan program mendesak yaitu mengurangi titik kemacetan di Kota Serang.





3. Tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan

Tujuan daerah terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan dicapai dengan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas / Pencemaran Air, Indeks Kualitas / Pencemaran Udara Indeks Tutupan Hutan/Lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki rentang nilai dan kategori sebagai berikut:

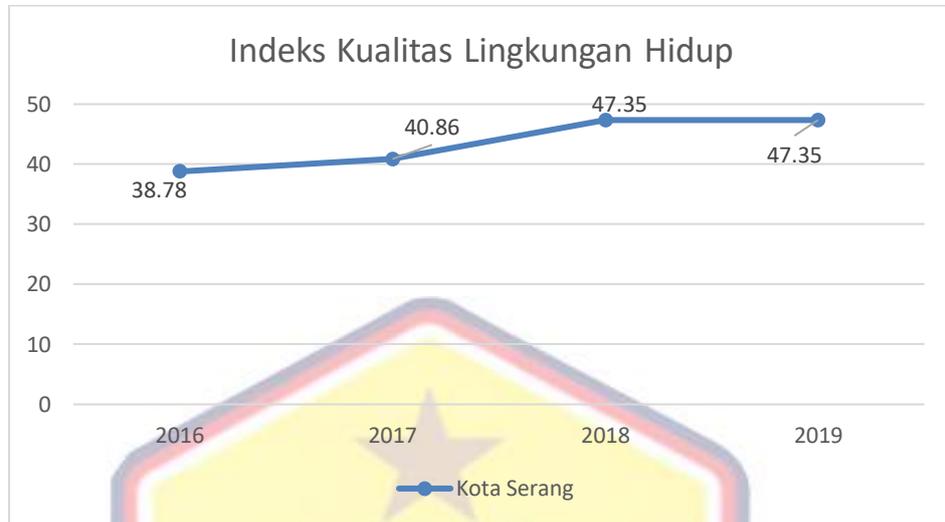
Nilai Interval	Kategori
> 90	Unggul
$82 < X \leq 90$	Sangat Baik
$74 < X \leq 82$	Baik
$66 \leq X \leq 74$	Cukup
$58 \leq X < 66$	Kurang
$50 \leq X < 58$	Sangat Kurang
$X < 50$	Waspada

IKLH Kota Serang tahun 2019 adalah sebesar 47,35 poin. Indeks tersebut sama dengan tahun 2018 seperti tersaji dalam grafik 3.10 berikut:





Grafik 3.10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2016–2019



Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2019

Dari grafik 3.10 di atas, Kota Serang memiliki angka sebesar 47,35. Hal ini menyimpulkan bahwa status lingkungan hidup Kota Serang pada tahun 2019 berada dalam posisi **waspada**. Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Kota Serang masih belum memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat.

Tujuan daerah terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan ditunjang dengan 2 sasaran strategis sebagai berikut:

a. Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dicapai dengan meningkatkan Indeks Kualitas / Pencemaran Air, Indeks Kualitas / Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan.





Tabel 3.17
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1.	Indeks kualitas mutu udara	Poin	67,83	53	67,20	78,87
2.	Indeks kualitas mutu air	Poin	56,30	65	51,05	78,54
3.	Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	25,32	37	29,70	80,27
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						79,23

Capaian tersebut mengalami fluktuasi setiap tahun, untuk capaian terhadap target akhir RPJMD tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan
Hidup Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Indeks kualitas mutu udara	Poin	48	67,20	71,43
2.	Indeks kualitas mutu air	Poin	71	51,05	71,90
3.	Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	39	29,70	76,15
Rata-rata terhadap RPJMD					73,16

Dari tabel di atas pencapaian terhadap kondisi akhir RPJM di tahun pertama ini untuk indeks kualitas mutu udara baru mencapai 71,43%, Indeks kualitas mutu air baru mencapai 71,90% dan Indeks kualitas mutu tutupan lahan mencapai 76,15%. Adapun capaian selama 4 tahun ke belakang untuk indeks-indeks tersebut tersaji dalam grafik 3.11 sampai dengan 3.13 berikut:





Grafik 3.11
Indeks Kualitas Udara Kota Serang Tahun 2016–2019



Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2019

Grafik 3.12
Indeks Kualitas Air Kota Serang Tahun 2016–2019

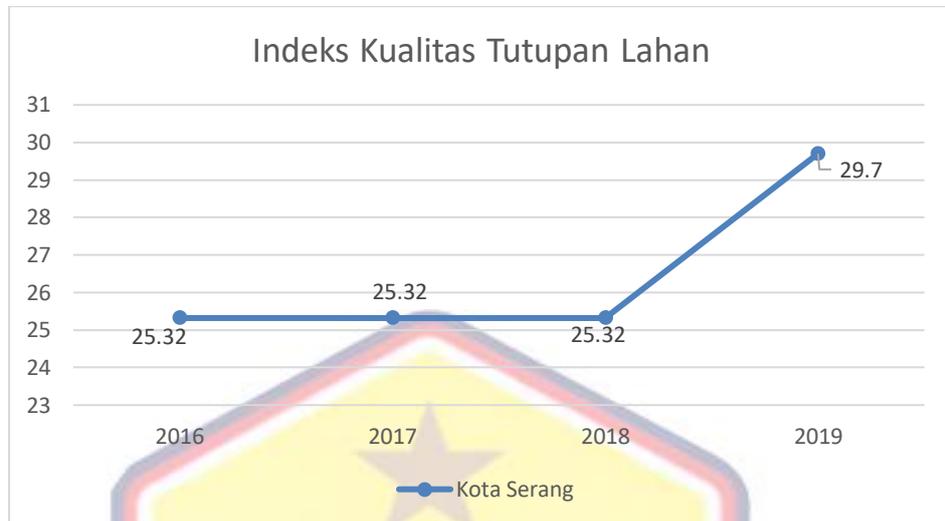


Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2019





Grafik 3.13
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Serang Tahun 2016–2019



Sumber : DLH Kota Serang, Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah Terdapat dua prinsip umum penempatan stasiun pemantau kualitas udara, yaitu pada daerah di mana terdapat reseptor yang akan terkena dampak dan pada daerah di mana diperkirakan terdapat sumber dan konsentrasi pencemar yang tinggi. Karena dampak dan karakteristik sumber setiap polutan berbeda-beda, sehingga parameter yang dipantau di setiap lokasi dapat berbeda-beda. Dengan kata lain, tergantung pada karakteristik sumber dan pertimbangan lain seperti kondisi topografi, meteorologi dan tata guna lahan. Dalam rangka pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara Lokasi sampling ada 4 lokasi pada masing masing kab/kota:

1. Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
2. Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya)
3. Pemukiman padat penduduk (urban background)
4. Kawasan komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak terpengaruh langsung transportasi).





Untuk Kota Serang ada 4 titik lokasi yang di ambil dalam rangka perhitungan indeks kualitas udara:

1. Industri : PT. PUSRI Jalan Jendral Sudirman Kemang dengan titik koordinat -6.121444,106.182672
2. Perkantoran : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang dengan titik koordinat -6.112396,106.141691
3. Pemukiman : Perumahan Penancangan dengan titik koordinat -115189,106.179634
4. Transportasi : Alun-alun Timur (depan Ramayana) jalan Veteran dengan titik koordinat -6.117010,106.151847

Dari hasil pemantauan 4 (empat) titik lokasi tersebut dan dengan menggunakan Rumus: Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Serang Tahun 2019 = $100 - (50/0.9 \times (ieu - 0,1))$ maka diperoleh Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Serang Tahun 2019 adalah sebesar **67,20 poin** dan masuk dalam kategori **Cukup Baik**.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) untuk satu titik & periode pemantauan merupakan total penjumlahan dari perwakilan masing-masing nilai sub indeks parameter kualitas air dengan bobot parameter sesuai dengan rumus. Secara umum nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:

1. Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
2. Ketersediaan & fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta factor cuaca local, iklim regional, dan global;
3. Penggunaan air;
4. Tingkat erosi dan sedimentasi.

Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang mengambil sampel pengujian air pada 4 (empat) titik sampel dan dilakukan dalam sebulan 4 (empat) kali, yaitu pada aliran sungai Kaibon, Bendungan Gelam, Kaujon Serang, dan Cibeurih. Setiap titik pemantauan





diasumsikan sebagai satu data dan akan memiliki status kualitas air. Konsentrasi parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu air, apabila nilai /Lij lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai /Lij baru dengan rumus sebagai berikut: ($/Lij$) baru = $1,0 + P \cdot \log(/Lij)$ Selanjutnya dilakukan penghitungan indeks pencemaran, dengan formula sebagai berikut: Keterangan: / Lij M : nilai maksimum dari / Lij / Lij R : nilai rata-rata dari /Lij Evaluasi terhadap nilai Pij: Memenuhi baku mutu jika $0 < Pij \leq 1$ Tercemar ringan jika $1,0 < Pij \leq 5,0$ Tercemar sedang jika $5,0 < Pij \leq 10,0$ Tercemar berat jika $Pij > 10,0$ Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, dan Total Coliform.

Dari hasil pengujian kualitas air yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, maka diperoleh Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2019 sebesar **51,05 poin** atau masuk ke dalam kategori **Buruk**. Indeks Kualitas Air Kota Serang tahun 2019 masuk dalam kategori buruk, hal ini di pengaruhi oleh factor alam, manusia, industri di sekitar yang mengakibatkan kondisi air kualitasnya menjadi buruk.

Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di ambil tutupan lahan yang bercirikan hutan dan lahan-lahan yang sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau, sempadan sungai, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Saat ini Kota Serang belum memiliki Kebun Raya ataupun Taman Keanekaragaman hayati sehingga tidak tersedia untuk keperluan perhitungan IKTL. Berdasarkan peta penutupan lahan Tahun 2019 tutupan lahan yang bercirikan hutan antara lain yaitu hutan lahan kering sekunder, hutan





bakau, hutan kota, dan hutan tanaman. Untuk ruang terbuka hijau teridentifikasi antara lain RTH Kopasus Group 1, Taman Debus, Stadion Maulana Yusuf, Alun-alun Kota Serang dan RTH Tol Jakarta–Merak yang melintasi Kota Serang. Sedangkan untuk sempadan sungai teridentifikasi lahan dengan tutupan lahan perkebunan/kebun pada sepanjang Sungai Cibanten. Untuk menghitung Indeks Kualitas Tutupan Lahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang Tahun 2019 menggunakan persamaan:

$$IKTL = 100 - \frac{([84.3 - (TH \times 100)] \times 50)}{54,3}$$

Dari hasil perhitungan Indeks kualitas Tutupan Lahan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, maka diperoleh Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Tahun 2019 diperoleh nilai sebesar 29,70

Indeks tutupan lahan relatif tetap pada nilai 25,32 di tahun 2016 – 2018, namun di tahun 2019 naik menjadi 29,70, hal ini menunjukkan kurun waktu 2016 – 2018 tidak adanya perubahan luas wilayah hutan primer dan hutan sekunder.

Peningkatan kualitas IKU, IKA dan IKTL masih di bawah target yang ingin dicapai karena terus bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan dan perilaku masyarakat yang belum begitu sadar dengan lingkungan.

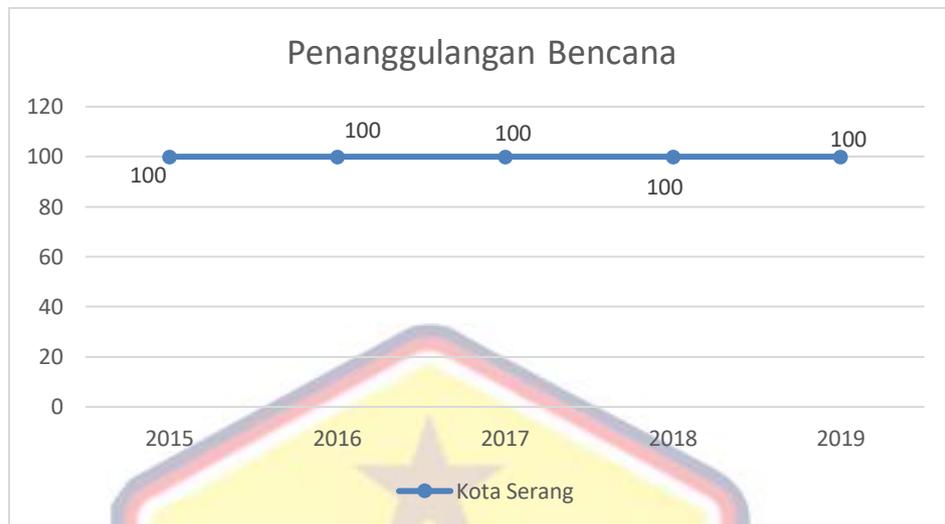
b. Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana

Setiap kali bencana terjadi, maka tuntutan publik terhadap peran serta pemerintah dalam menanggulangnya selalu mengemuka. Pemerintah diharapkan sebagai pihak yang paling mampu menangani bencana, mulai dari masalah antisipasi dini sampai pada proses penanganan dampak yang ditimbulkannya (rehabilitasi).





Grafik 3.14
Cakupan Penanggulangan Bencana Tahun 2015–2019



Sumber : BPBD Kota Serang, Tahun 2019

Dari grafik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penanganan terhadap korban bencana telah dilaksanakan secara maksimal, mulai dari penanganan sampai pemulihan dampak bencana.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1.	Cakupan Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						100

Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana juga ditunjang dengan indikator cakupan penanggulangan bencana, dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, yang artinya setiap bencana atau musibah yang terjadi di Kota Serang selalu ditanggulangi seluruhnya.





Tabel 3.20
Capaian Kinerja Meningkatnya Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

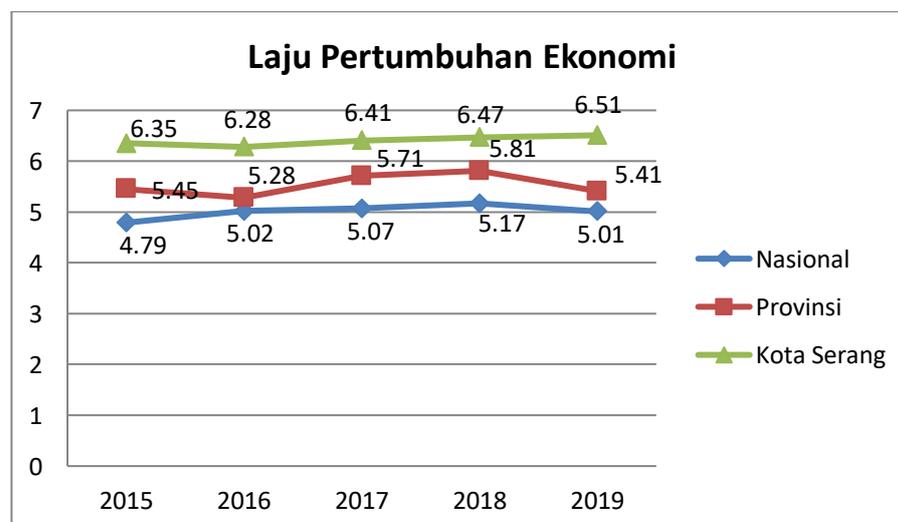
No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Cakupan Penanggulangan Bencana	%	100	100	100
Rata-rata terhadap RPJMD					100

Dari tabel di atas pencapaian terhadap kondisi akhir RPJM di tahun pertama ini untuk cakupan penanggulangan bencana mencapai 100%, artinya tahun ini Kota Serang dapat menanggulangi bencana yang terjadi sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

4. Tujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Serang pada Tahun 2019 mencapai 6,51% dimana pencapaian tersebut lebih tinggi dari Tahun 2018 yang hanya mencapai 6,47%. Grafik yang menunjukkan perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi terlihat pada grafik 3.15 berikut:

Grafik 3.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Serang Tahun 2015–2019



Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2019



Selama periode 2015-2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Serang selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Serang relatif lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi makro secara regional Banten dan nasional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kota Serang setiap tahunnya menunjukkan trend kenaikan dan cukup stabil terhadap gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun domestik. Relatif stabilnya iklim perekonomian Kota Serang selama ini harus tetap dijaga dan dipelihara oleh semua pemangku kepentingan agar dapat mempertahankan laju pertumbuhan yang tinggi.

a. Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat

Capaian Kinerja meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat diukur dengan 6 indikator dengan capaian sebagai berikut:

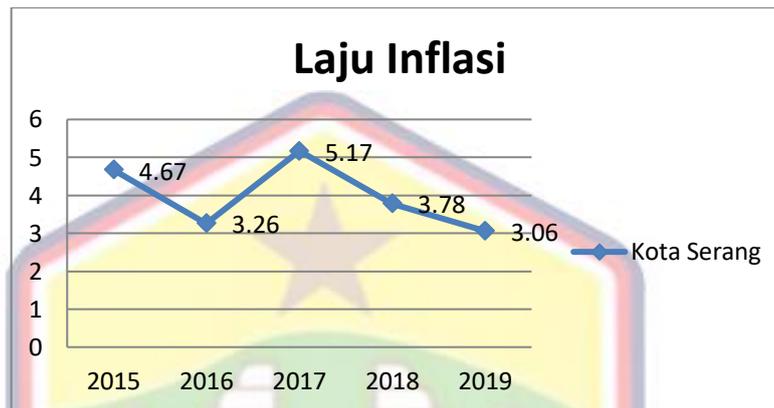
Tabel 3.21
Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1.	Tingkat inflasi daerah	%	3,78	3 – 5	3,06	100
2.	Indeks daya beli	Poin	78,76	79,59	79,12	99,41
3.	PDRB per kapita	Juta Rp.	42,68	44,50	42,29	95,03
4.	Indeks Ketimpangan Regional Williamson	Poin	0,55	0,54	0,45	120
5.	Angka Kemiskinan	%	5,36	5,26	5,28	99,62
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,16	8,08	8,08	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						102,34



Tingkat inflasi Kota Serang tahun 2019 mencapai 3,06% lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Banten yang mencapai 3,30%, fluktuasi tingkat inflasi di Kota Serang terlihat pada grafik 3.16 berikut:

Grafik 3.16
Laju Inflasi Kota Serang Tahun 2015–2019



Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2019

Kota Serang selama periode 2015-2019 mengalami fluktuasi laju inflasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015 tingkat inflasi ada di kisaran 4,67%, pada tahun 2016 tingkat inflasi yang ada mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 3,26%. Namun pada tahun 2017, tingkat inflasi Kota Serang mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 5,17%. Pada tahun 2019, inflasi Kota Serang mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar 3,06%.

Indeks Daya Beli merupakan kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang dan mode. Indeks Daya Beli Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 adalah 78,76 poin. Adapun untuk tahun 2019 indeks daya beli mencapai 79,12 dari yang ditargetkan sebesar 79,59 atau 99,41%.





PDRB per kapita Kota Serang tahun 2019 mencapai 42,29 juta rupiah dari yang ditargetkan sebesar 44,50 juta rupiah. Capaian tahun 2019 lebih kecil dibandingkan kondisi awal pada tahun 2018 sebesar 42,68 juta rupiah.

Indeks Ketimpangan Regional Williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan antar wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai data dasar. Pengertian indeks ini adalah apabila indeks williamson semakin besar atau mendekati angka satu menunjukkan ketimpangan yang semakin besar dan apabila angka indeks williamson jauh dari angka satu atau mendekati angka nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil. Batasan tingkat ketimpangan antar daerah menggunakan ukuran:

- ✓ Bila Indeks Williamson $< 0,3$ artinya ketimpangan wilayah rendah
- ✓ Bila Indeks Williamson $0,3-0,5$ artinya ketimpangan wilayah sedang
- ✓ Indeks Williamson $> 0,5$ artinya ketimpangan wilayah tinggi

Indeks Williamson Kota Serang 2018 sebagai kondisi awal RPJMD Kota Serang Tahun 2018 – 2023 adalah 0,55 poin yang menandakan masih tingginya ketimpangan di Kota Serang. Adapun untuk tahun 2019 indeks williamson mencapai 0,45 atau berada pada kategori sedang. Keadaan ini lebih baik dari kondisi awal tahun 2018. Rendahnya ketimpangan Williamson di Kota Serang karena sudah meratanya pembangunan di seluruh Kecamatan-kecamatan dengan dilaksanakannya program-program kewilayahan baik berupa program yang bersumber dari DAU, DAK maupun APBD.

Kemiskinan merupakan permasalahan di seluruh daerah perkotaan yang harus segera ditanggulangi. Angka kemiskinan yang terus menurun merupakan potret keberhasilan kinerja pemerintah dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

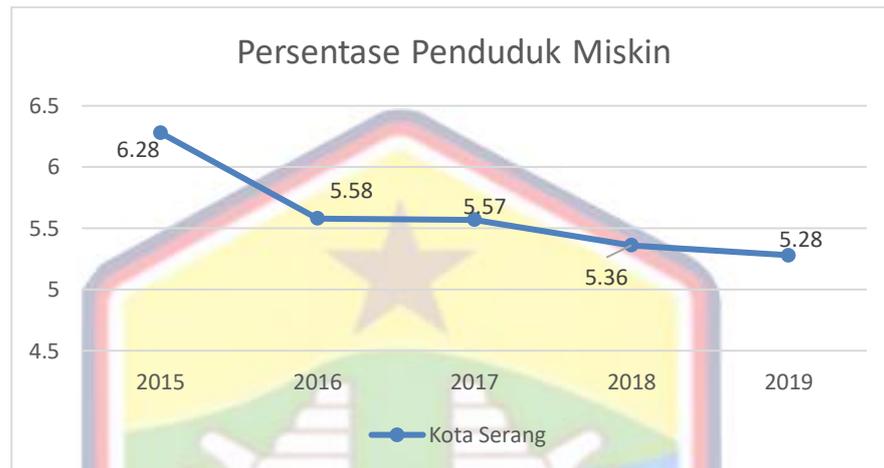
Pemerintah Kota Serang dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin dari 5,36% tahun 2018 turun menjadi 5,28% pada tahun 2019,





keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan tersebut merupakan hasil dari pembangunan secara menyeluruh yang mencakup bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk program keluarga berencana, dan prasarana pendukungnya, terlihat pada grafik 3.17.

Grafik 3.17
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015–2019



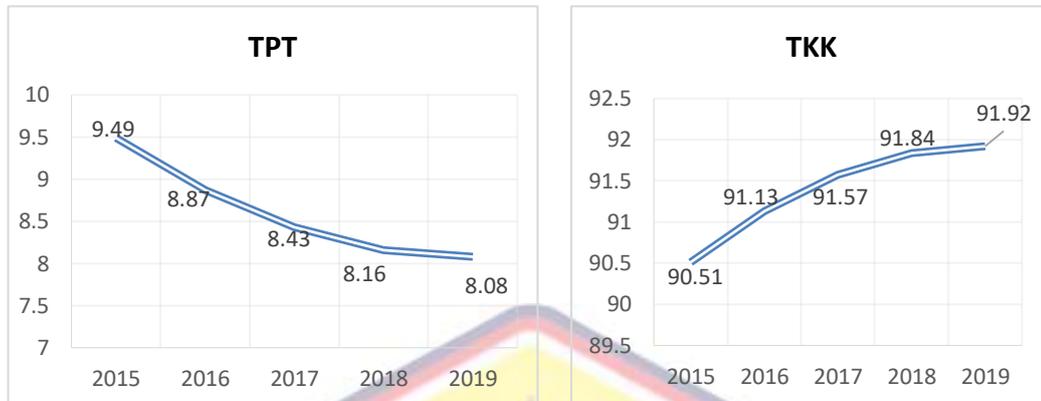
Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2019

Sebagai salah satu unsur/pelaku kegiatan ekonomi, tenaga kerja telah diberdayakan lewat program/kegiatan Tahun 2019. seperti bursa kerja, pelatihan tenaga kerja dan lain sebagainya. Namun permasalahan mendasar dibidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya angka pengangguran. Hal ini disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja, selain itu perkembangan industri kreatif dan wirausahawan muda belum optimal. Tingkat pengangguran terbuka Kota Serang berhasil diturunkan dari 8,16% pada Tahun 2018 menjadi sebesar 8,08% di tahun 2019.





Grafik 3.18
Tingkat Pengangguran Terbuka 2015–2019



Sumber : BPS Kota Serang, Tahun 2019

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Meningkatnya Perekonomian Daerah dan Daya Beli Masyarakat Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Tingkat inflasi daerah	%	3 – 5	3,06	100
2.	Indeks daya beli	Poin	83,61	79,12	94,63
3.	PDRB per kapita	Juta Rp.	52,50	42,29	80,55
4.	Indeks Ketimpangan Regional Williamson	Poin	0,50	0,45	111,11
5.	Angka Kemiskinan	%	4,86	5,28	92,04
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,93	8,08	98,14
Rata-rata terhadap RPJMD					96,08

Meskipun baru tahun pertama RPJMD tapi capaian sudah di atas 80% dan ada yang sudah melebihi target akhir RPJMD, hal ini menandakan percepatan pembangunan di Kota Serang semakin baik. Ke depan akan di evaluasi terkait target akhir RPJMD dengan berpedoman capaian tahun 2019 ini.





5. Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi

Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang oleh Kemenpan RB, indeks reformasi birokrasi Kota Serang untuk tahun 2017 - 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23
Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kota Serang Tahun 2017-2019

No	Komponen Penilai	Bobot	Nilai		
			2017	2018	2019
I	Komponen Pengungkit				
1.	Manajemen Perubahan	5	2,72	2,74	2,79
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	2,71	2,71	2,71
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	2,16	2,16	2,19
4.	Penataan Tata Laksana	5	2,33	2,40	2,53
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	9,80	10,00	10,14
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	2,58	2,58	2,86
7.	Penguatan Pengawasan	12	3,71	3,60	3,62
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	2,66	2,69	2,90
Total Komponen Pengungkit (A)		60	28,67	28,88	29,74
II	Komponen Hasil				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	6,81	7,12	7,32
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6	4,68	3,78	4,14
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,69	5,55	6,11
4.	Opini BPK	3	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Internal Pelayanan Publik	10	7,80	7,90	8,83
Total Komponen Hasil (B)		40	27,98	27,35	29,40
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	56,65	56,23	59,14
Kategori			CC	CC	CC





Kota Serang telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil evaluasi tahun 2018, namun beberapa tindak lanjut masih perlu disempurnakan. Beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas RB di Kota Serang adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi RB belum mencakup seluruh OPD sebab masih fokus pada pelaksanaan kegiatan kelompok kerja (pokja) tim RB di Pemkot
- b. Belum selesai menindaklanjuti catatan terkait finalisasi penyusunan *Road Map*, peningkatan peran agen perubahan, identifikasi peraturan perundang-undangan, evaluasi kelembagaan, perbaikan peta proses bisnis sinergitas antar unit kerja, pengelolaan sistem manajemen SDM
- c. Hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan masih pada kategori “cukup”
- d. Belum ada penyusunan *Grand Design* Teknologi Informasi (*Road Map E-Government*)
- e. Pemetaan gap kompetensi pegawai perlu ditindaklanjuti dengan *Human Capital Development Plan (HCDP)*
- f. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengawasan belum dilakukan sehingga belum dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan
- g. Pembangunan ZI untuk unit kerja percontohan belum dilaksanakan sehingga saat ini belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM

Survei untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi RB menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Survei kepada pegawai tentang integritas jabatan menunjukkan hasil:
 - ✓ 19% memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dan ukuran keberhasilannya
 - ✓ 52% memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilannya
 - ✓ 29% tidak memahami tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan maupun ukuran keberhasilannya





- b. Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,01 dalam skala 0 – 4 dengan rincian:

No.	Komponen	Indeks 2019
1.	Budaya organisasi dan sistem anti korupsi	2,84
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,05
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,07
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,07
Indeks Integritas Organisasi		3,01

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai Kota Serang terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Capaian tersebut masih di bawah skor indeks integritas ideal, yaitu 3,60 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014. Dengan demikian, masih terdapat ruang perbaikan dalam penerapan sistem integritas pada Kota Serang.

- c. Survei eksternal ke masyarakat penerima layanan Kota Serang menunjukkan hasil sebagai berikut:
- 1) Survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,09 dalam skala 4, yang berarti masih terdapat selisih atau gap antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima
 - 2) Survei persepsi korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,42 dalam skala 4, yang berarti masyarakat memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi dan mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja serta memperkuat integritas pegawai Kota Serang, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu:

1. Melakukan finalisasi *Road Map* RB 2020 – 2024 selaras dengan RPJMD dan *Road Map* RB Nasional 2020 – 2024





2. Melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai secara konsisten dan memastikan segala kebijakan penerapan RB dapat terimplementasikan sampai ke level unit kerja
3. Memaksimalkan peran *agent of change* sebagai penggerak perubahan di masing-masing unit kerja
4. Membangun sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tumpang tindih untuk selanjutnya dilakukan perbaikan
5. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang dilanjutkan dengan perubahan kelembagaan untuk mendukung pencapaian kinerja
6. Membuat peta proses bisnis sesuai kebutuhan organisasi dan berbasis pada kinerja yang akan dicapai. Kemudian dilanjutkan dengan penyelarasan SOP terhadap peta proses bisnis serta melakukan monitoring terhadap penggunaan aplikasi terkait SOP.
7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pengawasan kearsipan
8. Membuat, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan *Grand Design* teknologi informasi (*Road Map E-Government*)
9. Memperbaiki sistem manajemen SDM, antara lain memperhatikan reviu standar kompetensi jabatan, penyusunan peta gap kompetensi pegawai, assessment pada seluruh pegawai, dan menerapkan *Human Capital Development Plan (HCDP)*
10. Memperhatikan penilaian kinerja individu secara berkala yang mengacu pada kinerja organisasi sebagai dasar pemberian *reward and punishment*
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi sistem pengawasan untuk memastikan efektifitas sistem pengawasan dan membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja
12. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan internalisasi budaya pelayanan prima dan didukung dengan pelatihan terkait yang berkelanjutan.





a. Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Capaian Kinerja kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur dengan 4 indikator dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	72,00	73,00	77,80	106,58
2.	Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
3.	Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	CC	B	CC	91,60
4.	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	WTP	n/a	-
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran						99,39

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Tahun 2019	
				Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	81	77,80	96,05
2.	Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100
3.	Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	BB	CC	78,51
4.	Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	n/a	-
Rata-rata terhadap RPJMD					96,08



Berdasarkan pengukuran indeks kepuasan masyarakat melalui survey yang dilakukan Bappeda Kota Serang, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Serang secara agregat pada tahun 2019 ini mencapai sebesar 77,80 yang secara umum terkategori memuaskan dengan kualifikasi mutu pelayanan B. Capaian ini tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 yang mencapai indeks sebesar 74,10; serta capaian tahun 2017 sebesar 70,82.

Tabel 3.26
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,5996	20,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,000	88,31 – 100	A	Sangat Baik

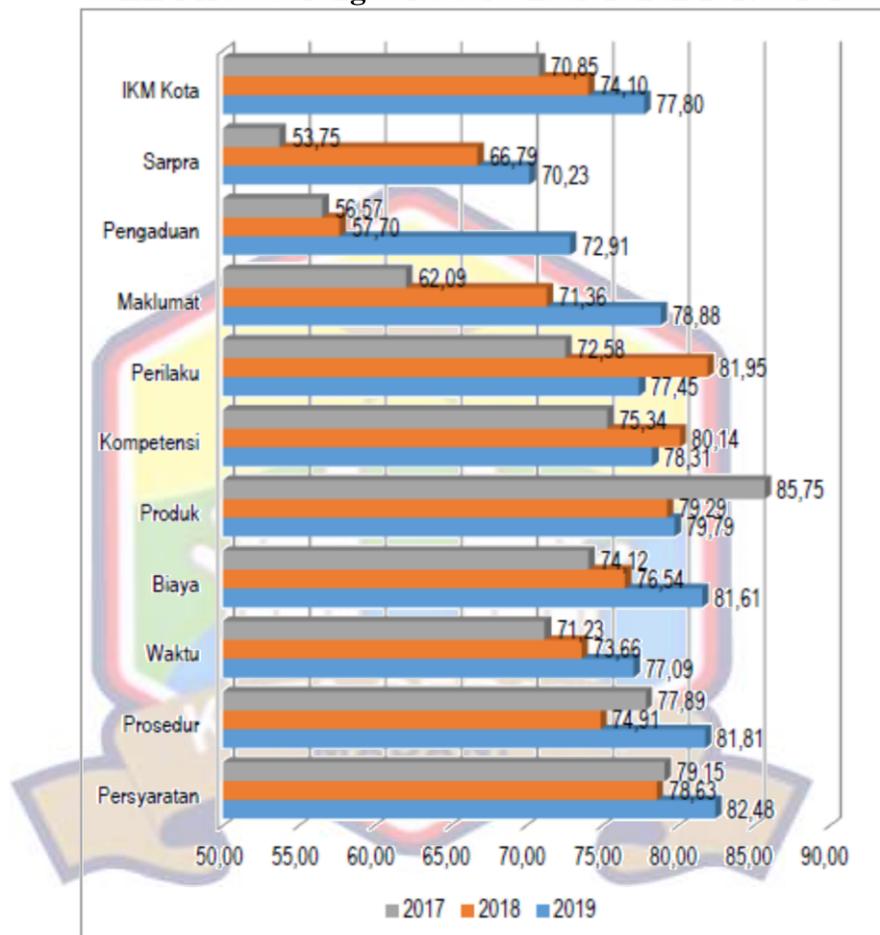
Sumber : Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Dari 10 unsur yang dinilai, 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) unsur yang dinilai telah mencapai kualifikasi baik atau memuaskan dengan rentang indeks antara 76,61 hingga 88,30; belum ada satupun unsur yang mencapai kualifikasi A. Meski secara umum telah terkategori baik atau memuaskan, namun masih terdapat 2 (dua) unsur yang bahkan masih berkualifikasi C, yaitu unsur pengelolaan pengaduan dengan indeks sebesar 72,91; dan unsur sarana prasarana pelayanan dengan capaian indeks sebesar 70,23. Kedua unsur ini bahkan tercatat memiliki indeks di bawah indeks agregat Kota Serang sebesar 77,80; sehingga perlu mendapat perhatian serius untuk dibenahi.



Perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat berdasarkan unsur-nya sebagaimana dijelaskan di atas, secara grafis dapat dilihat pada grafik IKM Kota Serang Berdasarkan Unsur Tahun 2019 berikut:

Grafik 3.19
IKM Kota Serang berdasar Unsur Tahun 2017 – 2019



Sumber : Bappeda Kota Serang Tahun 2019

Peningkatan IKM Kota Serang pada tahun 2019 paling banyak dikontribusi oleh kinerja 4 (empat) unsur pertama yang paling banyak mengalami perubahan, yaitu: pengelolaan pengaduan, unsur maklumat pelayanan, unsur prosedur pelayanan, dan unsur biaya pelayanan yang meningkat cukup signifikan. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala dan konsisten setiap tahun, terbukti efektif mampu mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pelayanan publik di Kota Serang, sehingga perlahan tetapi pasti dilakukan sejumlah upaya melalui intervensi program dan kegiatan



yang secara efektif mampu menysasar permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

Tabel 3.27
IKM Kota Serang Berdasar Indikator Komposit Tahun 2019

No	Indikator	Indeks	Mutu	Keterangan
1	Kemudahan Persyaratan	81,37	B	di atas rerata
2	Kemudahan Prosedur	78,10	B	di atas rerata
3	Ketepatan Waktu Buka Pelayanan	78,83	B	di atas rerata
4	Kesesuaian Waktu Istirahat	78,70	B	di atas rerata
5	Kesesuaian Waktu Tutup	78,29	B	di atas rerata
6	Kewajaran Lama WT Pelayanan	77,37	B	di bawah rerata
7	Kewajaran Biaya	83,68	B	di atas rerata
8	Bebas Pungli	81,78	B	di atas rerata
9	Produk Sesuai Harapan	80,50	B	di atas rerata
10	Angka Komplain	80,65	B	di atas rerata
11	Keterampilan Petugas	80,06	B	di atas rerata
12	Kemampuan Kominfo	79,77	B	di atas rerata
13	Pengalaman Petugas	79,82	B	di atas rerata
14	Responsivitas Petugas	79,38	B	di atas rerata
15	Non Diskriminatif	79,47	B	di atas rerata
16	Kesantunan	78,93	B	di atas rerata
17	Keramahan	78,38	B	di atas rerata
18	Ketersediaan Maklumat Pelayanan	84,04	B	di atas rerata
19	Integritas Maklumat Pelayanan	76,25	C	di bawah rerata
20	Ketersediaan Sarana Pengaduan	75,64	C	di bawah rerata
21	Respon Pengaduan Sesuai Harapan	72,57	C	di bawah rerata
22	Kebersihan Lingkungan	80,52	B	di atas rerata
23	Kenyamanan Ruang Pelayanan	77,89	B	di atas rerata
24	Kebersihan Toilet Umum	68,59	C	di bawah rerata
25	Ketersediaan APAR	75,61	C	di bawah rerata
26	Efektifitas Larangan Merokok	69,23	C	di bawah rerata
27	Sarpras Tidak Membahayakan	81,36	B	di atas rerata
28	Keamanan	88,21	B	di atas rerata
29	Ketersediaan Sarpras Afirmasi	60,48	D	di bawah rerata
30	Ketersediaan Rambu2 Mitigas Bencana	71,00	C	di bawah rerata
31	Ketersediaan Pelayanan Online	52,18	D	di bawah rerata

Sumber : Bappeda Kota Serang Tahun 2019



Berdasarkan tabel di atas teridentifikasi bahwa 70,97% indikator kepuasan pelayanan di Kota Serang masih terkategori B, dan belum terdapat satu indikator pun yang telah berkategori A. Sisanya sekira 22,58% bermutu C, dan 6,45% bermutu D. Meski demikian 67,74% indikatornya telah mencapai indeks di atas rerata indeks agregat di tingkat Kota sebesar 77,80, dan hanya terdapat 10 dari 31 indikator yang capaiannya masih di bawah rerata.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.28
Hasil Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kota Serang Tahun 2015-2019

No	Tahun	Skor	Status	Urutan Nasional
1.	2015	2,5519	Tinggi	65
2.	2016	2,7345	Tinggi	72
3.	2017	2,9606	Tinggi	70
4.	2018	3,0233	Sangat Tinggi	45
5.	2019	3,2344	Sangat Tinggi	

Nilai LPPD Kota Serang pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebesar 3,2344 dengan kategori Sangat Tinggi, capaian tersebut sesuai target yang ditetapkan yaitu





Sangat Tinggi atau capaian kinerja sebesar 100%. Namun urutan tingkat nasional belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang mencapai nilai sebesar 3,0233. Meningkatnya capaian kinerja nilai LPPD Tahun 2019 dikarenakan penyajian data dukung LPPD yang semakin baik dan lengkap.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian nilai LPPD antara lain mendorong OPD untuk memenuhi indikator kinerja kunci dengan akurat dan tepat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kemendagri, sehingga mudah-mudahan perolehan nilai LPPD Kota Serang Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 yang akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

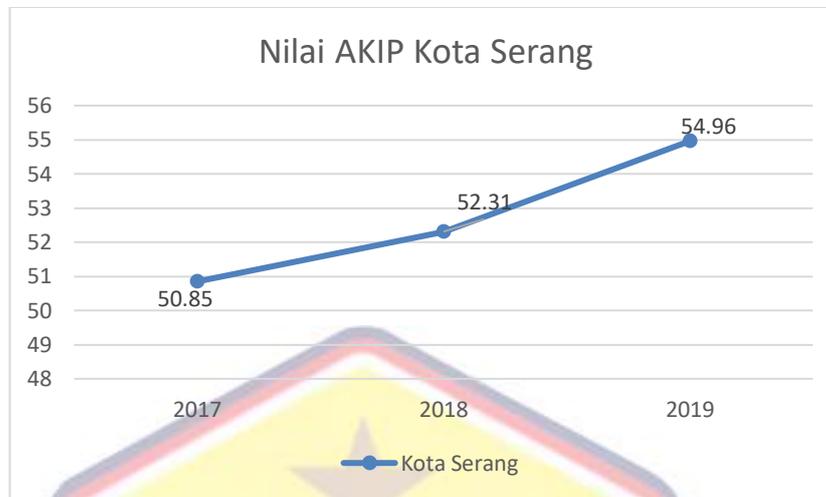
Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Atas Implementasi SAKIP.

Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2019 adalah 54,96 atau kategori CC belum memenuhi target B yang dicanangkan di tahun 2019. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Serang tahun 2019 adalah belum sesuai target atau baru mencapai 91,60%. Capaian nilai hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2017 s.d. 2019 sebagai berikut:





Grafik 3.20
Capaian Nilai AKIP Kota Serang Tahun 2017 – 2019



Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2019

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Serang sejak tahun 2017 meliputi meliputi 5 komponen AKIP sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.29
Hasil Evaluasi AKIP Kota Serang 2017 – 2019

Komponen	Bobot	2017	2018	% Kinerja Komponen berdasarkan bobot	Bobot	2019	% Kinerja Komponen berdasarkan bobot
Perencanaan Kinerja	35	15,83	16,42	46,91	30	17,67	58,90
Pengukuran Kinerja	20	12,13	12,16	60,80	25	13,06	52,24
Pelaporan Kinerja	15	9,24	9,29	61,93	15	9,31	62,07
Evaluasi Kinerja	10	4,22	4,23	42,30	10	4,58	45,80
Capaian Kinerja	20	9,44	10,21	51,05	20	10,34	51,70
Total	100	50,85	52,31		100	54,96	
Kategori		CC	CC			CC	

Sumber : Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang, Tahun 2019





Dari data tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa secara umum terdapat peningkatan pada seluruh komponen SAKIP. Komponen evaluasi kinerja menempati posisi kinerja terendah sebesar 45,80% dan kinerja tertinggi pada komponen pelaporan kinerja sebesar 62,07%.

Capaian tersebut hanya meningkat sebesar 2,65 point dari capaian tahun 2018 sebesar 52,31 dengan kategori CC. Capaian tersebut karena belum maksimalnya komitmen Pimpinan Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Serang, sehingga hasil evaluasi AKIP Kota Serang tahun 2019 belum memenuhi target yang ditetapkan.

Tidaklah mudah dalam mengelola masalah mendasar dalam implementasi SAKIP, beberapa masalah yang dihadapi antara lain:



Upaya yang dilakukan cukup efektif untuk meningkatkan SAKIP Kota Serang pada tahun mendatang adalah:

- a. Langkah memperkuat komitmen pimpinan
- b. Langkah penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan dari Tim Kemenpan RB
- c. Langkah penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala OPD
- d. Langkah membangun aplikasi e-Sakip





Dalam upaya menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Kota Serang, serta untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan, terdapat 3 rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi yaitu:

- a. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal berupa penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- b. Melakukan reviu berkala atas Indikator Kinerja Utama
- c. Melakukan evaluasi atas rencana aksi dan pemantauan secara berkala atas tindaklanjut hasil evaluasi rencana aksi.

Dalam kaitannya dengan target terhadap opini Pemerintah Kota Serang dalam kaitannya dengan audit LKPD Kota Serang Tahun 2019 yang diberikan oleh BPK-RI pada Tahun 2020, menargetkan masih mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dikarenakan Pemerintah Kota Serang masih terus mengupayakan berbagai hal dalam upaya mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2020 untuk LKPD Tahun 2019.

Pada tanggal 21 Mei 2019 melalui Surat No. 119b/S/XVIII.SRG/05/2019 dari BPK RI, perihal hasil pemeriksaan atas Keuangan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2018 maka LKPD Kota Serang Tahun 2018 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Serang.

Berdasarkan surat tersebut, meskipun mendapat opini WTP namun masih banyak yang perlu mendapat perhatian, yaitu adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu pengelolaan pajak air bawah tanah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah belum memadai. Kemudian masih adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara yaitu:





- a. Pengelolaan belanja hibah belum tertib dan pembayaran senilai Rp.426.345.000 tidak didukung bukti pembayaran valid
- b. Denda atas pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Kota Serang Tahap II senilai Rp.733.632.820.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- a. Mempercepat revisi Peraturan Daerah terkait pengelolaan rusunawa dan perubahan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
- b. Memerintahkan PPKD untuk memproses pembayaran tidak disertai bukti pertanggungjawaban yang sah senilai Rp.426.345.000 dan menyetorkan ke Kas Daerah
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses pengenaan denda keterlambatan dengan melakukan pemotongan atau melakukan penyetoran ke Kas Daerah

Diharapkan pada Tahun 2020 untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang per 31 Desember 2019, Pemerintah Kota Serang bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai dengan akhir tahun renstra yaitu pada tahun 2023.

Dalam mempertahankan WTP dilakukan pula perbaikan manajemen kinerja dan keuangan oleh Inspektorat, beberapa upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kepatuhan melalui pengawasan internal oleh setiap OPD dengan optimalisasi implementasi SPIP.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan



dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.1.431.933.623.259 dengan realisasi sebesar Rp.1.335.416.109.082 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp.629.009.184.585 dengan realisasi sebesar Rp.582.739.486.928 dan Belanja Langsung sebesar Rp.802.924.438.674 dengan realisasi sebesar Rp.752.676.622.154 sehingga ada penghematan sebesar Rp.96.517.514.177

Tabel 3.30
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2019
(Anaudited)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Kontribusi
1.	Belanja Tidak Langsung	629.009.184.585	582.739.486.928	43,64
2.	Belanja Langsung	802.924.438.674	752.676.622.154	56,36
Jumlah		1.431.933.623.259	1.335.416.109.082	93,26

Sumber : BPKAD Kota Serang, Tahun 2019

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 43,64% dari realisasi belanja Kota Serang di tahun 2019 dan sisanya sebesar 56,36% disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Serang yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.802.924.438.674. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Serang tahun 2019 adalah sebesar Rp. 752.676.622.154 atau 93,74%, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.31
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Serang
Per Sasaran Strategis Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	144.079.410.397	139.267.585.171	96,66
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	107.348.591.919	95.031.693.121	88,53
3.	Terkendalnya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	5.005.654.000	4.670.322.492	93,30
4.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	109.765.382.960	103.009.816.846	93,85
5.	Menurunnya luasan kawasan kumuh	46.683.442.055	43.324.353.684	92,80
6.	Menurunnya kemacetan lalu lintas	16.201.849.400	15.324.774.644	94,59
7.	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	36.048.212.990	35.089.403.807	97,34
8.	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	1.574.825.000	1.330.053.100	84,46
9.	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	30.910.488.820	29.185.566.145	94,42
10.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	305.306.581.133	286.443.053.144	93,82
Jumlah		802.924.438.674	752.676.622.154	93,74

Sumber : Bagian Organisasi dan Reformasi Birokasi Setda Kota Serang Tahun 2019 (diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah Kota Serang pada tahun 2019.



**ANALISA EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Serang, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.32
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Tujuan dan Sasaran
Pemerintah Kota Serang Tahun 2019

No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%
A	Misi 1 Menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan				
1	Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	1	100,04	238.969.600.784	93,19
a.	Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	2	100,17	139.267.585.171	96,66
b.	Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100,04	95.031.693.121	88,53
c.	Sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	1	67,92	4.670.322.492	93,30
B	Misi 2 Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan				
1	Tujuan terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	1	100,02	161.658.945.174	93,63
a.	Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	1	99,94	103.009.816.846	93,85
b.	Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh	1	139,58	43.324.353.684	92,80
c.	Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas	1	90,91	15.324.774.644	94,59





No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	%
2	Tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	1	94,32	36.419.456.907	96,80
a.	Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	3	79,23	35.089.403.807	97,34
b.	Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	1	100	1.330.053.100	84,46
C	Misi 3 Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing				
1	Tujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	1	100	29.185.566.145	94,42
a.	Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	6	96,23	29.185.566.145	94,42
D	Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik				
1	Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	1	84,49	286.443.053.144	93,82
a.	Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	4	99,39	286.443.053.144	93,82
Jumlah		21		752.676.622.154	



Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Serang.

ANALISA EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 10 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 4 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.33
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
A	Misi 1 Menguatkan peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan				
1	Tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	1	100,04	93,19	6,85
a.	Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	2	100,17	96,66	3,51
b.	Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	100,04	88,53	11,51
c.	Sasaran terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	1	67,92	93,30	-



No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
B	Misi 2 Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan				
1	Tujuan terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	1	100,02	93,63	6,39
a.	Sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	1	99,94	93,85	-
b.	Sasaran menurunnya luasan kawasan kumuh	1	139,58	92,80	46,78
c.	Sasaran menurunnya kemacetan lalu lintas	1	90,91	94,59	-
2	Tujuan terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	1	94,32	96,80	-
a.	Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	3	79,23	97,34	-
b.	Sasaran meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	1	100	84,46	15,54
C	Misi 3 Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing				
1	Tujuan tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	1	100	94,42	5,58
a.	Sasaran meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	6	96,23	94,42	-





No.	Tujuan & Sasaran	Jumlah Indikator	% Rerata Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
D	Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik				
1	Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	1	84,49	93,82	-
a.	Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	4	99,39	93,82	-

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efisien terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Serang.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pada Misi 1 Sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Serang diantaranya:

1. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan masyarakat
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan dasar
3. Kualifikasi guru dan tenaga kependidikan belum memenuhi standar, sebagai gambaran rasio rata-rata jumlah guru SD terhadap jumlah murid SD per kelas sebesar 1:41 (standar 1:32)

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pendidikan Kota Serang yaitu:





1. Dengan legalitas yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perencanaan dikoordinasikan, kebijakan disusun, dan pelaksanaan kebijakan disinkronkan bersama instansi lain yang terkait dalam wujud semangat *good governance*.
2. Dengan aparatur/pegawai yang profesional dan bertanggung jawab akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
3. Dengan sistem informasi dan komunikasi yang ada diselenggarakanlah pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.
4. Melaksanakan komitmen agar pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi konsisten.
5. Meningkatkan peran serta *stakeholders* dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.
6. Memperkuat kapasitas sasaran pembangunan pendidikan melalui kerjasama lokal, nasional, dan regional.
7. Meningkatkan kerjasama melalui pelaksanaan rencana strategis.
8. Melaksanakan koordinasi yang efektif dan efisien untuk mengoptimalkan partisipasi instansi terkait dan *stakeholders*.
9. Sistem informasi yang ada dapat diakses oleh lembaga-lembaga lain yang mendukung mutu pelaksanaan pembangunan pendidikan.
10. Hasil pengendalian dan pengawasan dapat dijadikan bahan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang.
11. Mengintensifkan koordinasi internal guna konsistensi dan mantapnya pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan Kota Serang .
12. Memantapkan pelaksanaan tugas dan fungsi melalui kegiatan pengembangan SDM dan pembinaan secara intensif.
13. Menyelenggarakan pertemuan secara berkala dengan berbagai instansi teknis, *stakeholders*, dan dunia usaha / industri.





14. Merevitalisasi dan memetakan cagar budaya, kesenian dan situs yang di Kota Serang untuk di optimalkan dan dilegalkan sebagai warisan budaya nasional.

Pada sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Terjadinya perubahan pola kejadian kematian maternal dengan disertai penyakit penyerta
2. Masih tingginya kematian neonates dengan asfiksia dan BBLR serta balita gizi buruk
3. Ketersediaan RS belum memenuhi standar
4. Adanya tenaga/SDMK yang mutasi keluar OPD Dinas Kesehatan
5. Tidak meratanya tenaga paramedic di Puskesmas

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pendidikan Kota Serang yaitu:

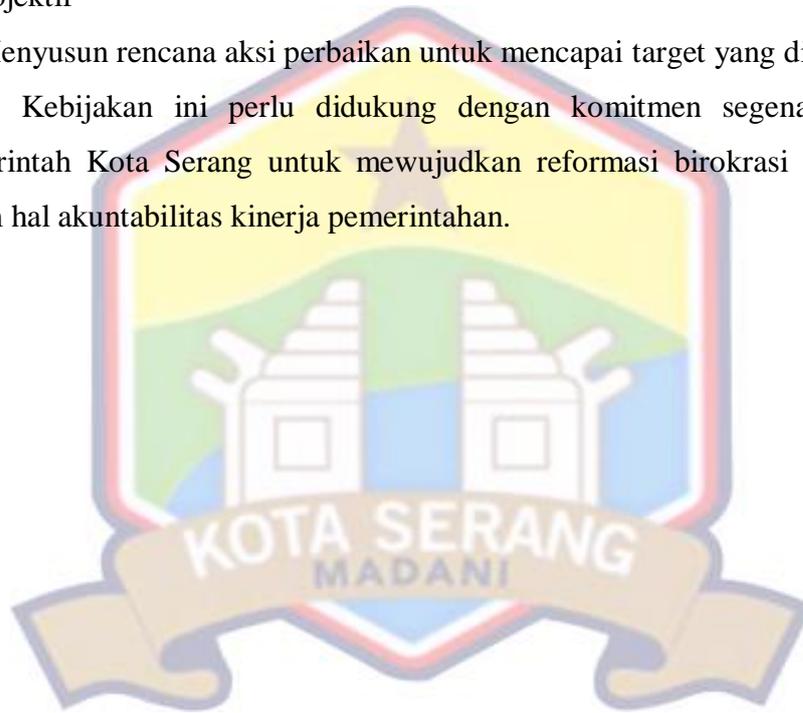
1. ANC terpadu dengan peningkatan screening ibu hamil, pemeriksaan oleh dokter umum di Puskesmas setiap ibu hamil pertama kontak dengan tenaga kesehatan dan pemeriksaan oleh obgyn
2. Inovasi program Aje Kendor (Awasi Jaga Evaluasi Kehamilan Resiko Tinggi), peningkatan surevileans kematian maternal dan perinatal
3. Mengimplementasikan PMK
4. Upaya pemenuhan tenaga medis dengan perekrutan SDM di sarana kesehatan pemerintah
5. Upaya pemerataan tenaga paramedis di Puskesmas yang disesuaikan dengan kebutuhan

Pada Misi 4 Sasaran Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada indikator Hasil Evaluasi AKIP masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu B. Untuk selanjutnya sebagai langkah perbaikan sekaligus guna mendukung pencapaian sasaran dimaksud Pemerintah Kota Serang akan berupaya menerapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:





1. Menyelenggarakan pembinaan secara berkesinambungan serta mendorong segenap Perangkat Daerah untuk melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 2. Meningkatkan komitmen segenap elemen Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi khususnya dalam hal pelayanan publik sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan
 3. Pembinaan dan evaluasi oleh APIP dilaksanakan secara konsisten dan objektif
 4. Menyusun rencana aksi perbaikan untuk mencapai target yang ditetapkan
- Kebijakan ini perlu didukung dengan komitmen segenap elemen Pemerintah Kota Serang untuk mewujudkan reformasi birokrasi khususnya dalam hal akuntabilitas kinerja pemerintahan.





**BAB
04**

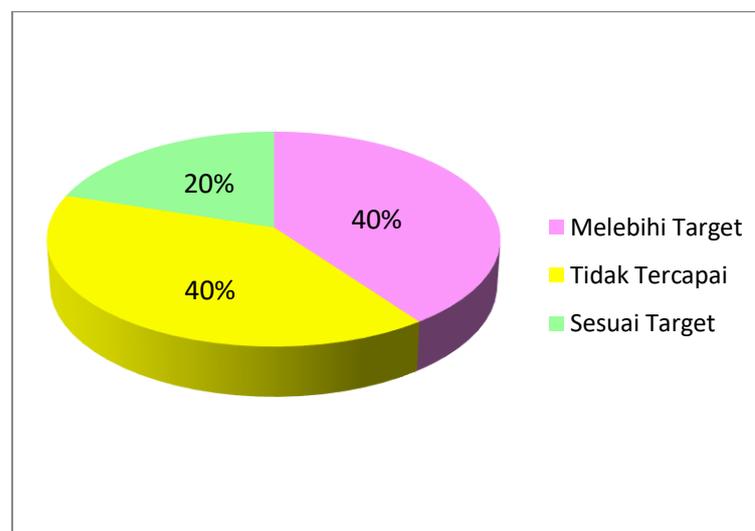
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Pemerintah Kota Serang Tahun 2019. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Pemerintah Kota Serang Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Serang dan Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Hasil pengukuran Tujuan Daerah pada 5 Indikator Kinerja Utama Kota Serang yang telah ditetapkan pada tahun 2019, sebagai berikut:

- ✓ 2 indikator atau 40% melebihi target dengan kategori sangat baik
- ✓ 1 indikator atau 20% sesuai target dengan kategori sangat baik
- ✓ 1 indikator atau 40% tidak mencapai target kategori baik

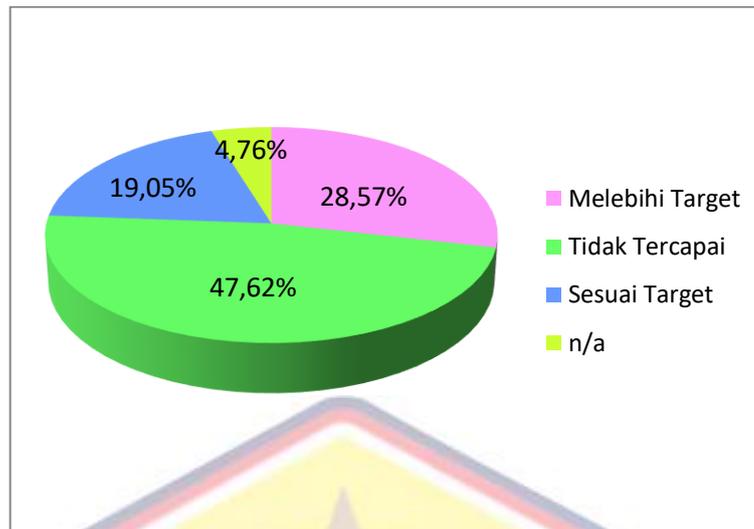




Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Serang menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran telah dapat direalisasikan dengan Sangat Baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di atas 90%, sesuai target dan atau melebihi target. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 100,63%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik
- b. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 100,04%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik
- c. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 67,92%, tidak mencapai target dengan interpretasi Cukup
- d. Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 99,92%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik
- e. Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 139,58%, melebihi target dengan interpretasi Sangat Baik
- f. Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 90,91%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik
- g. Sasaran 7 terdiri dari 3 indikator dengan nilai capaian 79,23%, tidak mencapai target dengan interpretasi Baik
- h. Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 100%, mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik
- i. Sasaran 9 terdiri dari 6 indikator dengan nilai capaian 102,34%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik
- j. Sasaran 10 terdiri dari 4 indikator dengan nilai capaian 99,39%, tidak mencapai target dengan interpretasi Sangat Baik





Dengan demikian pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum optimal dengan kategori cukup, sehingga perlu perhatian pada tahun-tahun berikutnya, indikator kinerja tersebut yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebagaimana yang direncanakan sebesar 1,08%, realisasinya LPP adalah sebesar 1,59% atau belum dapat mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 67,92%, sehingga dampak yang muncul yaitu pemukiman yang semakin padat, kemacetan yang tinggi, persaingan dunia kerja, kerawanan sosial dan eksploitasi alam dan lingkungan. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang program-program KB harus lebih dioptimalkan.

Selain itu dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Kota Serang, upaya yang dilakukan cukup efektif pada tahun mendatang adalah:

- Langkah memperkuat komitmen pimpinan
- Langkah penguatan soliditas tim fasilitasi SAKIP dan pendampingan dari Tim Kemenpan RB
- Langkah penguatan kapasitas dan kesungguhan kepala OPD
- Langkah membangun aplikasi e-Sakip

Sedangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi dalam rangka perbaikan untuk tahun mendatang yaitu:





- a. Memperbaiki sistem evaluasi kinerja internal berupa penyusunan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- b. Melakukan reviu berkala atas Indikator Kinerja Utama
- c. Melakukan evaluasi atas rencana aksi dan pemantauan secara berkala atas tindaklanjut hasil evaluasi rencana aksi.

Dalam Tahun Anggaran 2019, untuk pencapaian indikator kinerja 5 (lima) tujuan daerah dan 21 (dua puluh satu) sasaran strategis pada RPJMD Kota Serang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.802.924.438.674 (unaudited) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.752.676.622.154 atau dengan serapan mencapai 93,74% (data sebelum audit oleh BPK).

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja tahun pertama yang tercantum dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023, dan khususnya untuk tahun 2019 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Serang Perubahan Tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut harus menjadi motivasi untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Serang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kota Serang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder sataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Serang.

Serang, 30 Maret 2020



WALIKOTA SERANG

H. SYAFRUDIN. S.Sos.,M.Si.



Lampiran:

**Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Serang
Tahun Anggaran 2019**

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
A	Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,07	72,10	100,04	Jumlah per Tujuan	256,433,656,316	238,969,600,784	93.19
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,63	8,67	100,46	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	7,397,587,600	6,710,796,762	90.72
							Program Pendidikan Sekolah Dasar	71,633,859,982	69,618,896,694	97.19
							Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	47,056,391,515	45,936,143,088	97.62
							Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	7,001,148,000	6,597,018,000	94.23
							Program Kepemudaan	1,930,000,000	1,814,968,000	94.04
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67	12,77	100,79	Program Keolahragaan	2,492,324,300	2,478,320,000	99.44
							Program Perpustakaan	1,188,450,000	1,092,791,568	91.95
							Program Kebudayaan	3,763,699,000	3,492,986,059	92.81
							Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	826,950,000	758,960,000	91.78
							Program Pendidikan Politik Masyarakat	789,000,000	766,705,000	97.17
		Rata-rata Capaian dari 2 indikator						100,63	Jumlah per Sasaran	144,079,410,397

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,80	67,83	100,04	Program Kesehatan Masyarakat	6,679,632,750	5,550,343,940	83.09
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3,607,820,450	2,982,551,615	82.67
							Program Pelayanan Kesehatan	15,446,600,032	14,359,995,215	92.97
							Program Sumber daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan	49,523,148,070	42,664,292,018	86.15
							Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Serang	30,148,390,617	27,655,256,658	91.73
							Program Perlindungan Perempuan dan Anak	1,110,000,000	998,066,975	89.92
							Program Pemberdayaan Perempuan	833,000,000	821,186,700	98.58
							Rata-rata Capaian dari 1 indikator			
3	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,08	1,59	67,92	Program Pengendalian Penduduk	3,224,544,000	3,024,217,250	93.79
							Program Pelayanan KB dan Ketahanan Keluarga	1,781,110,000	1,646,105,242	92.42
							Rata-rata Capaian dari 1 indikator			

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
B	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	57,70	57,71	100,02	Jumlah per Tujuan			
							172,650,674,415	161,658,945,174	93.63	
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	71	70,96	99,94	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	68,597,319,617	64,006,500,524	93.31
							Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan	1,220,000,000	1,213,225,100	99.44
							Program Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum	25,480,380,850	24,583,216,900	96.48
							Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	3,009,562,793	2,058,152,870	68.39
							Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan lainnya	1,525,000,000	1,456,852,100	95.53
							Program Pengendalian Banjir	1,959,925,000	1,791,695,300	91.42
							Program Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan	6,239,104,700	6,218,163,000	99.66
							Program Pembinaan Jasa Kontruksi	200,000,000	185,793,000	92.90
							Program Komunikasi & Informatika	1,534,090,000	1,496,218,052	97.53
							Rata-rata Capaian dari 1 indikator			
							109,765,382,960	103,009,816,846	93.85	

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	%	2,01	1,44	139,58	Program Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan	14,526,932,550	13,530,390,016	93.14
							Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman	32,156,509,505	29,793,963,668	92.65
		Rata-rata Capaian dari 1 indikator						139,58	Jumlah per Sasaran	46,683,442,055
3	Menurunnya kemacetan lalu lintas	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	40	44	90,91	Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	5,425,738,400	5,285,915,200	97.42
							Program Angkutan Darat	291,990,000	187,812,000	64.32
							Program Perhubungan Laut	650,000,000	605,133,375	93.10
							Program Teknis Sarana dan Prasarana	9,834,121,000	9,245,914,069	94.02
		Rata-rata Capaian dari 1 indikator						90,91	Jumlah per Sasaran	16,201,849,400

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
C	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	50,20	47,35	94,32	Jumlah per Tujuan			
							37,623,037,990	36,419,456,907	96.80	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Mutu Udara	Poin	53	67,20	78,87	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1,434,845,000	1,404,564,500	97.89
		Indeks kualitas mutu air	Poin	65	51,05	78,54	Program Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	675,000,000	668,034,300	98.97
		Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	37	29,70	80,27	Program Pengelolaan sampah dan B3	32,131,417,990	31,373,294,107	97.64
							Program Penataan Ruang	1,221,950,000	1,125,062,900	92.07
							Program fasilitasi administrasi pertanahan	585,000,000	518,448,000	88.62
		Rata-rata Capaian dari 3 indikator			79,23	Jumlah per Sasaran	36,048,212,990	35,089,403,807	97.34	
2	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana	%	100	100	100	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	464,825,000	458,255,000	98.59
							Program Darurat Bencana	885,000,000	818,643,100	92.50
							Program Pemulihan Pasca bencana	225,000,000	53,155,000	23.62
		Rata-rata Capaian dari 1 indikator			100	Jumlah per Sasaran	1,574,825,000	1,330,053,100	84.46	

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
D	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,51	6,51	100	Jumlah	30,910,488,820	29,185,566,145	94,42
1	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3 – 5	3,06	100	Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah	740,212,600	557,805,390	75.36
							Kualitas Kelembagaan Koperasi	475,000,000	472,097,000	99.39
							Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Umkm	478,260,525	471,064,500	98.50
							Program Perdagangan	1,559,800,000	1,522,766,574	97.63
							Program Pengelolaan Pasar	5,752,674,475	5,469,771,000	95.08
		Indeks daya beli	Poin	79,59	79,12	99,41	Program Pengembangan Industri	449,375,000	442,162,000	98.39
							Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	1,662,335,220	1,480,214,863	89.04
							Program Peningkatan Produksi dan Bina usaha Peternakan	1,270,351,000	1,207,209,918	95.03
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)	44,5	42,29	95,03	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan	749,094,000	673,143,200	89.86
							Program pengembangan Produksi dan Pemasaran hasil perikanan	570,000,000	551,206,000	96.70
							Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1,080,024,000	1,025,790,000	94.98
					Program Promosi Pariwisata	1,580,000,000	1,448,112,900	91.65		

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
		Indeks ketimpangan regional Williamson	Poin	0,54	0,45	120	Program Destinasi Pariwisata & Bina Usaha	1,653,670,000	1,361,230,000	82.32
							Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	570,000,000	539,525,000	94.65
							Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman modal	295,200,000	236,820,200	80.22
							Program Penanganan Fakir Miskin	766,270,000	727,200,000	94.90
							Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	971,597,000	945,467,000	97.31
							Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	538,870,000	525,600,000	97.54
		Angka Kemiskinan	%	5,26	5,28	99,62	Program Rehabilitasi Sosial	1,496,305,000	1,471,783,600	98.36
							Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,085,000,000	1,072,701,500	98.87
							Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	839,450,000	772,970,000	92.08
							Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	580,000,000	568,550,000	98.03
		Tingkat pengangguran terbuka	%	8,08	8,08	100	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	380,000,000	315,058,000	82.91
							Program Pemberdayaan Masyarakat	5,367,000,000	5,327,317,500	99.26
							Rata-rata Capaian dari 6 indikator			

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
E	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	70,00	59,14	84,49	Jumlah	305,306,581,133	286,443,053,144	93,82
1	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	73,00	77,80	106,58	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	154,620,000	153,665,000	99.38
		Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum	569,517,000	558,154,800	98.00
							Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	656,868,000	631,879,000	96.20
		Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	B	CC	91,60	Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum	123,065,389	117,430,000	95.42
							Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	4,511,440,089	4,474,820,880	99.19
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2,943,447,000	2,630,024,000	89.35
							Program pembinaan dan pengembangan aparatur	296,155,040	265,343,000	89.60
							Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah	2,081,933,964	1,691,941,892	81.27
							Program Pengendalian Pembangunan	460,290,058	430,348,230	93.50
		Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	6,610,798,095	5,878,626,368	88.92					

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP	n/a	-	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	701,276,434	445,652,600	63.55
							Program Layanan E-Government	1,665,820,000	1,540,759,802	92.49
							Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1,630,262,000	1,609,490,577	98.73
							Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	638,560,000	588,157,432	92.11
							Program Pengelolaan Pengamanan Teknologi Informasi dan Persandian	169,020,000	139,854,357	82.74
							Program Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	630,000,000	560,288,500	88.93
							Program Penyediaan Data, Informasi dan Mitigasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	700,000,000	630,401,465	90.06
							Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	434,660,000	357,952,473	82.35
							Program Pelayanan Pencatatan Sipil	300,000,000	300,000,000	100.00
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,032,721,250	947,959,618	91.79
							Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	1,528,967,000	1,494,041,500	97.72
							Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Investasi dan Perijinan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	544,500,000	512,482,744	94.12

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
							Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	46,090,000	36,029,000	78.17
							Program Kearsipan	537,266,000	524,537,000	97.63
							Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	45,134,131,888	40,463,379,764	89.65
							Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1,460,000,000	1,346,858,634	92.25
							Program Administrasi Kepegawaian	1,409,127,500	752,067,984	53.37
							Program Pendidikan dan Pelatihan	4,232,745,000	3,763,645,100	88.92
							Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	7,402,160,000	7,281,630,500	98.37
							Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	2,441,990,000	2,355,152,568	96.44
							Program perencanaan pembangunan ekonomi	1,107,930,000	1,095,198,142	98.85
							Program perencanaan pembangunan daerah	3,483,652,393	3,391,599,261	97.36
							Program perencanaan sosial dan budaya	1,409,510,000	1,312,798,926	93.14
							Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	2,064,834,200	1,944,789,483	94.19

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
							Program Penyusunan APBD	2,636,700,643	2,418,318,794	91.72
							Program Penatausahaan APBD	896,750,000	886,641,491	98.87
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,898,950,000	3,407,469,003	87.39
							Program Akuntansi	1,492,920,000	1,440,043,200	96.46
							Program Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTP	1,732,990,000	1,658,453,497	95.70
							Program Pendapatan Pajak Daerah	2,410,578,000	2,089,003,240	86.66
							Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,592,970,000	4,451,235,000	96.91
							Program penegakan produk hukum daerah	289,800,000	234,210,000	80.82
							Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	2,202,410,000	1,976,918,800	89.76
							Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Potensi Aparatur	473,430,000	438,715,000	92.67
							Program Pemerintahan Umum Kecamatan	2,804,813,150	2,729,778,600	97.32
							Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	2,405,583,000	2,355,005,636	97.90
							Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12,735,800,000	12,601,972,000	98.95
							Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T)	4,281,193,300	3,888,665,000	90.83

No.	Tujuan Daerah dan Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
							Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T)	20,147,914,700	19,518,358,928	96.88
							Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	120,787,392,692	114,990,111,734	95.20
							Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	2,702,993,994	2,560,390,200	94.72
							Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	14,120,819,354	13,109,021,407	92.83
							Program Pelayanan Administrasi Kelurahan	5,579,214,000	5,461,781,014	97.90
		Rata-rata Capaian dari 4 indikator				99,39	Jumlah per Sasaran	305,306,581,133	286,443,053,144	93.82



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si

Jabatan : WALIKOTA SERANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 31 Oktober 2019

WALIKOTA SERANG

H. SYAFRUDIN, S.Sos., M.Si

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2019**

**MISI 1 : MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS NILAI-NILAI
KEMANUSIAAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,07
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,63
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67
	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,80
	Terkendalinya kuantitas, kualitas dan mobilitas pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,08

**MISI 2 : MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Daerah	Poin	57,70
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Infrastruktur Wilayah	%	71
	Menurunnya luasan kawasan kumuh	Persentase Kawasan Kumuh	%	2,01
	Menurunnya kemacetan lalu lintas	Persentase Potensi Titik Kemacetan	%	40

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2.	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	50,20
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Mutu Udara	Poin	53
		Indeks kualitas mutu air	Poin	65
		Indeks kualitas mutu tutupan lahan	Poin	37
	Meningkatnya mitigasi dan penanggulangan bencana	Cakupan penanggulangan bencana	%	100

MISI 3 : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensi keunggulan lokal daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,51
	Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat	Tingkat inflasi daerah	%	3-5
		Indeks daya beli	Poin	79,59
		PDRB Per kapita	Juta (Rp)	44,50
		Indeks ketimpangan regional Williamson	Poin	0,54
		Angka Kemiskinan	%	5,26
		Tingkat pengangguran terbuka	%	8,08

MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	Poin	70,00
	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	73,00
		Nilai LPPD Kota	Kategori	Sangat tinggi
		Hasil Evaluasi AKIP	Kategori	B
		Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kategori	WTP

PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Rp. 120,787,392,692
2.	Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan	Rp. 2,702,993,994
3.	Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja	Rp. 14,120,819,354
4.	Program Pelayanan Administrasi Kelurahan	Rp. 5,579,214,000
5.	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	Rp. 7,397,587,600
6.	Program Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 71,633,859,982
7.	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp. 47,056,391,515
8.	Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 7,001,148,000
9.	Program Kebudayaan	Rp. 3,763,699,000
10.	Program Kesehatan Masyarakat	Rp. 6,679,632,750
11.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp. 3,607,820,450

PROGRAM	ANGGARAN
12. Program Pelayanan Kesehatan	Rp. 15,446,600,032
13. Program Sumber daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan	Rp. 49,523,148,070
14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Serang	Rp. 30,148,390,617
15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 68,597,319,617
16. Program Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp. 6,239,104,700
17. Program Pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp. 1,220,000,000
18. Program Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah dan Fasilitas Umum	Rp. 25,480,380,850
19. Program Pembinaan Jasa Kontruksi	Rp. 200,000,000
20. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Rp. 3,009,562,793
21. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan pengairan lainnya	Rp. 1,525,000,000
22. Program Pengendalian Banjir	Rp. 1,959,925,000
23. Program Penataan Ruang	Rp. 1,221,950,000
24. Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan	Rp. 585,000,000
25. Program Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan	Rp. 14,526,932,550
26. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Permukiman	Rp. 32,156,509,505
27. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 4,592,970,000
28. Program Penegakan produk hukum daerah	Rp. 289,800,000
29. Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Rp. 2,202,410,000
30. Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Potensi Aparatur	Rp. 473,430,000
31. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp. 464,825,000
32. Program Darurat Bencana	Rp. 885,000,000
33. Program Pemulihan Pasca bencana	Rp. 225,000,000
34. Program Penanganan Fakir Miskin	Rp. 766,270,000
35. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 971,597,000
36. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 538,870,000

PROGRAM	ANGGARAN
37. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1,496,305,000
38. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 1,085,000,000
39. Program Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp. 839,450,000
40. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Rp. 580,000,000
41. Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Rp. 380,000,000
42. Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp. 1,110,000,000
43. Program Pemberdayaan Perempuan	Rp. 833,000,000
44. Program Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 5,367,000,000
45. Program Pengendalian Penduduk	Rp. 3,224,544,000
46. Program Pelayanan KB dan Ketahanan Keluarga	Rp. 1,781,110,000
47. Program Pengelolaan Sampah dan B3	Rp. 32,131,417,990
48. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 1,434,845,000
49. Program Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 675,000,000
50. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp. 434,660,000
51. Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp. 300,000,000
52. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 1,032,721,250
53. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	Rp. 1,528,967,000
54. Program Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 5,425,738,400
55. Program Angkutan Darat	Rp. 291,990,000
56. Program Perhubungan Laut	Rp. 650,000,000
57. Program Teknis Sarana dan Prasarana	Rp. 9,834,121,000
58. Program Komunikasi & Informatika	Rp. 1,534,090,000
59. Program Layanan E-Government	Rp. 1,665,820,000
60. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp. 1,630,262,000
61. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Rp. 638,560,000

PROGRAM	ANGGARAN
62. Program Pengelolaan Pengamanan Teknologi Informasi Dan Persandian	Rp. 169,020,000
63. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Rp. 570,000,000
64. Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Investasi dan Perijinan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Rp. 544,500,000
65. Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman modal	Rp. 295,200,000
66. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Rp. 46,090,000
67. Program Perpustakaan	Rp. 1,188,450,000
68. Program Kearsipan	Rp. 537,266,000
69. Program Promosi Pariwisata	Rp. 1,580,000,000
70. Program Destinasi Pariwisata dan Bina Usaha	Rp. 1,653,670,000
71. Program Kepemudaan	Rp. 1,930,000,000
72. Program Keolahragaan	Rp. 2,492,324,300
73. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Rp. 1,662,335,220
74. Program Peningkatan Produksi dan Bina usaha Peternakan	Rp. 1,270,351,000
75. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp. 749,094,000
76. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 1,080,024,000
77. Program Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 570,000,000
78. Program Perdagangan	Rp. 1,559,800,000
79. Program Pengelolaan Pasar	Rp. 5,752,674,475
80. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 475,000,000
81. Program Pemberdayaan Dan Pengembangan UMKM	Rp. 478,260,525
82. Program Pengembangan Industri	Rp. 449,375,000
83. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 2,441,990,000
84. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp. 1,107,930,000
85. Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 3,483,652,393
86. Program perencanaan sosial dan budaya	Rp. 1,409,510,000

PROGRAM	ANGGARAN
87. Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	Rp. 2,064,834,200
88. Program Penyusunan APBD	Rp. 2,636,700,643
89. Program Penatausahaan APBD	Rp. 896,750,000
90. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3,898,950,000
91. Program Akuntansi	Rp. 1,492,920,000
92. Program Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTP	Rp. 1,732,990,000
93. Program Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 2,410,578,000
94. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp. 1,460,000,000
95. Program Administrasi Kepegawaian	Rp. 1,409,127,500
96. Program Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 4,232,745,000
97. Program Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp. 630,000,000
98. Program Penyediaan Data, Informasi dan Mitigasi Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp. 700,000,000
99. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Rp. 45,134,131,888
100. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 7,402,160,000
101. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp. 154,620,000
102. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum	Rp. 569,517,000
103. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan	Rp. 656,868,000
104. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum	Rp. 123,065,389
105. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rp. 4,511,440,089
106. Program Penataan Peraturan PerundangUndangan	Rp. 2,943,447,000
107. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Rp. 296,155,040
108. Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 2,081,933,964
109. Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah	Rp. 740,212,600
110. Program Pengendalian Pembangunan	Rp. 460,290,058

PROGRAM	ANGGARAN
111. Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan	Rp. 6,610,798,095
112. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Rp. 701,276,434
113. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 826,950,000
114. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 789,000,000
115. Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Rp. 2,804,813,150
116. Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Rp. 2,405,583,000
117. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Rp. 12,735,800,000
118. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU-T)	Rp. 4,281,193,300
119. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kelurahan (DAU-T)	Rp. 20,147,914,700
JUMLAH	Rp. 802,924,438,674

Serang, 31 Oktober 2019

WALIKOTA SERANG,



H. SYAFRUDIN, S.Sos, M.Si

